

TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS MANAJEMEN RESIKO

Buatlah Paper (Review) Kasus Manajemen Risiko ditempat Bapak Ibu beraktivitas dengan ketentuan:\

1. Pembahasan meliputi beberapa risiko yang ada dimulai dari cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, Teknik manajemen risiko yang digunakan dan diversifikasi risiko jika ada
2. Paper terdiri dari 4 Bab yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Objek Pembahasan, Pembahasan, Kesimpulan dan saran.
3. Paper ditulis dengan font berukuran 12 spasi 1,5 margin kertas normal. Jumlah Halaman antara 10 s.d 20 halaman
4. Tidak memiliki kesamaan isi melebihi 30 % dengan paper peserta ujian yang lain.

**MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



Oleh :

AKHMAD RIZA

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NIM 192510003

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN – S2
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan paper ini. Penyusunan paper ini merupakan salah satu bagian dalam rangka ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen risiko, pada Universitas Bina Darma, Palembang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak lupa penulis sampaikan kepada Dosen Pengasuh Mata Kuliah Manajemen Risiko Ibu Dr. Fitriasuri, S.E, Ak, M.M dan semua pihak yang telah membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan paper ini.

Dalam penyusunan paper ini, penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, bimbingan dan saran yang sifatnya membangun dan akhirnya dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih semoga paper ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pengguna lainnya.

Palembang, Desember 2020

Penulis

ABSTRAK

AKHMAD RIZA NIM. 192510003. Manajemen Risiko Pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir

Paper ini bertujuan untuk mereview kegiatan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dan manfaat paper ini sebagai bahan ujian akhir semester, untuk mengetahui level risiko dalam pengelolaan administrasi keuangan, dan melakukan tahapan penanganan dalam mencegah risiko yang akan terjadi.

Data dari paper ini berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan responden kepala sub bagian tata usaha, Bendahara, staf tata usaha, operator SIMAK BMN, operator SAIBA, Operator Persediaan dan Operator RKAKL. Pertanyaan menanyakan kondisi 5 tahun terakhir.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	2
1.4. Ruang Lingkup	3
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN	
2.1. Gambaran Umum	4
2.2. Objek Pembahasan	4
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Identifikasi risiko	6
3.2. Memahami dan Menilai Skala Risiko.....	7
3.3. Evaluasi Risiko	8
3.4. Hasil Review.....	12
3.5. Penanganan Risiko.....	14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	16
4.2. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manajemen Risiko sudah diterapkan di lingkungan pemerintahan sejak tahun 2008 di Kementerian Keuangan. Namun sekarang ini sudah mulai diterapkan pada lembaga pemerintah lainnya, termasuk di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penerapan Manajemen Risiko di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir diterapkan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Manajemen risiko memiliki pengaruh yang penting dalam organisasi sebagai bagian perencanaan untuk menjamin sebuah organisasi dapat mencapai tujuan, Apabila kegiatan ini terus ditinjau ulang dan dimonitor secara berkesinambungan, berbagai risiko dapat ditekan / dikurangi bahkan ditransfer.

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dijadikan objek review manajemen risiko pada kegiatan ini karena berdasarkan hasil pengamatan penulis pengelolaan administrasi memiliki proses lengkap sehingga manajemen risiko pada review ini dapat dijadikan data awal dalam pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Badan Pusat Statistik.

Selain itu Output dari pengelolaan admintrasi keuangan seperti laporan keuangan akan langsung berkaitan dengan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir secara khusus dan Badan Pusat Statistik secara umum. Namun sejauh ini, kualitas dari pengelolaan administrasi keuangan masih menjadi tantangan seperti belum baiknya kelengkapan dari surat pertanggung jawaban dan pengungkapannya dalam laporan keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir,

sehingga ini menyebabkan pengaruh terhadap kinerja dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah dalam review ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Belum Optimalnya pengungkapan surat pertanggung jawaban pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari review kegiatan manajemen risiko pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Sebagai bahan Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Manajemens Risiko
2. Memperoleh level risiko yang didasarkan wawancara para pengelola administrasi keuangan
3. Mencapai dan mempertahankan pengurangan dampak risiko tanpa menempatkan lembaga dalam posisi eksposur risiko yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerjanya.
4. Mengevaluasi dan menilai semua risiko yang terkait dengan tujuan kinerja.

Manfaat dari review kegiatan manajemen risiko pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Manajemen risiko menghasilkan output berupa tabel analisis level risiko

2. Rekomendasi yang berupa strategi dan masukan untuk menerima/mengurangi/mencegah atau menghindari risiko yang dapat menurunkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan

1.4. Ruang Lingkup

Data dihasilkan dari hasil observasi dan wawancara dengan responden kepala sub bagian tata usaha, Bendahara, staf tata usaha, operator SIMAK BMN, operator SAIBA, Operator Persediaan dan Operator RKAKL. Pertanyaan menanyakan kondisi 5 tahun terakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN

2.1. Gambaran Umum

Manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan dalam sebuah organisasi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi). Tantangan penerapan manajemen risiko tidak hanya berada level identifikasi dan analisis risiko tetapi melainkan bergeser pada review yang berkelanjutan dan perbaikan yang terus menerus

Demikian halnya manajemen risiko yang diterapkan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, manajemen risiko diharapkan dapat meminimalisir/mencegah berbagai risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2.2. Objek Pembahasan

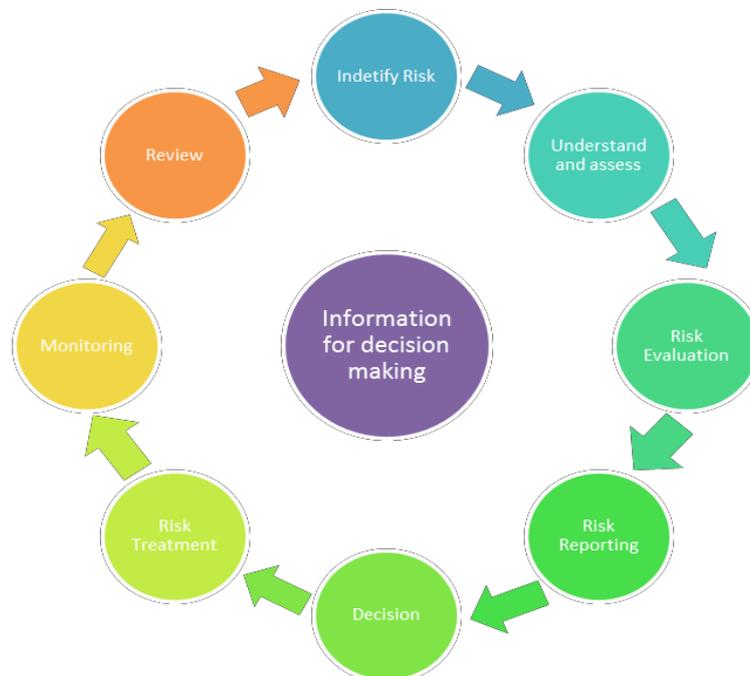
Objek Pembahasan review manajemen risiko ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil observasi dan diskusi bersama dengan kepala sub bagian tata usaha, Bendahara, staf tata usaha, operator SIMAK BMN, operator SAIBA, Operator Persediaan dan Operator RKAKL dijadikan bahan review dengan mengambil pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga review ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Untuk mencegah ataupun meminimalisir risiko yang ada maka ini dituangkan dalam siklus manajemen risiko. Siklus manajemen risiko adalah proses interaktif untuk mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan

memprioritaskan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Sejumlah langkah interaktif harus dilakukan, seperti berikut: Berikut beberapa langkah yang dilakukan, yang dituangkan dalam siklus kegiatan diantaranya:

- a. Identifikasi Risiko
- b. Memahami dan menilai skala risiko
- c. Evaluasi Risiko
- d. Pelaporan Risiko
- e. Keputusan
- f. Penangan Risiko
- g. Pemantauan
- h. Ulasan

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Resiko



Source: CIMA.2008. Risk management cycle; Dumbravă V, Măiorescu, t. et. aL .2013. Using Probability Impact Matrix in Analysis and Risk Assessment Projects

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan organisasi terhadap ketidakpastian. Ini memerlukan pemahaman tentang organisasi, pasar tempat perusahaan beroperasi, Aturan hukum Sosial, politik dan budaya di mana ia berada, serta pengembangan pengetahuan tentang tujuan strategis dan operasionalnya, termasuk faktor yang penting bagi kesuksesan dan ancaman dan peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan ini. Setiap risiko harus dievaluasi untuk mengidentifikasi cara metodis untuk memastikan bahwa semua kegiatan penting dalam organisasi telah diidentifikasi bagaimana hal itu dapat berevolusi melalui organisasi.

Untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut, risiko dapat dibagi lagi menjadi cara tertentu, contohnya meliputi Strategis - Ini menyangkut tujuan strategis jangka panjang organisasi. Mereka bisa terpengaruh oleh area seperti ketersediaan modal , Operasional - Hal ini menyangkut masalah sehari-hari bahwa organisasi tersebut berada Dihadapkan dengan karena berusaha untuk memberikan tujuan strategisnya, Keuangan - Ini menyangkut pengelolaan dan pengendalian keuangan organisasi yang efektif dan dampak faktor eksternal, Risiko pengguna data - berasal dari perubahan pada persyaratan pengguna, kurangnya pemahaman pengguna tentang dampak perubahan ini, proses pengelolaan perubahan persyaratan ini, dan kemampuan pelanggan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tim dan untuk secara akurat menyampaikan atribut dari Produk yang diinginkan.

Menurut Institute of Risk Management (2008) bahwa Teknik analisis meliputi:

- a. Workshop dan wawancara
- b. Brainstorming
- c. Kuesioner
- d. Pemetaan proses
- e. Membandingkan dengan organisations lainnya
- f. Diskusi dengan teman

3.2. Memahami dan Menilai skala risiko

Setelah risiko diidentifikasi, penilaian kemungkinan dampak dan kemungkinan terjadinya kejadian harus dilakukan dengan menggunakan parameter konsisten yang memungkinkan pengembangan analisis risiko yang prosritsed. Pada tahap perencanaan, manajemen harus menyetujui definisi dan jumlah kategori yang paling tepat untuk digunakan saat menilai kejadian dan dampak. Penilaian dampak risiko seharusnya tidak hanya memperhitungkan dampak keuangan tetapi juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan reputasi organisasi dan mengenali masalah politik dan Sensitivitas komersial yang terlibat.

Analisis harus bersifat kualitatif atau kuatitatif dan harus konsisten untuk memungkinkan perbandingan. Pendekatan kualitatif biasanya melibatkan penilaian risiko pada kategori rendah dan menengah. Penilaian dampak potensial dari risiko tertentu mungkin dipersulit oleh fakta bahwa adanya range kemungkinan terjadi atau bahwa risiko tersebut dapat terjadi beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Komplikasi semacam ini harus diantisipasi dan pendekatan yang konsisten diadopsi, yang misalnya, mungkin berusaha untuk memperkirakan skenario terburuk selama jangka waktu 5 tahun terakhir Kemungkinan terjadinya Kemungkinan kejadian. Kemungkinan terjadinya resiko perlu dinilai. Ini adalah praktik umum untuk menilai kejadian;

- a. Diabaikan
- b. Rendah
- c. Sedang
- d. Cukup berarti
- e. Tinggi

3.3. Evaluasi Risiko

Bila proses analisis risiko telah selesai, perlu untuk membandingkan perkiraan risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kriteria risiko dapat mencakup biaya dan tunjangan terkait, persyaratan hukum, faktor sosial ekonomi dan lingkungan, kekhawatiran pemangku kepentingan, dll. Oleh karena itu, evaluasi risiko digunakan untuk membuat keputusan tentang pentingnya risiko bagi organisasi dan mengapa masing-masing risiko spesifik harus diterima atau diperlakukan.

Tabel 3.1 Risk Level

Likelihood	Consequences				
	Insignificant 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Catastrophic 5
A. negligible	1x1 = 1	1x2 = 2	1x3 = 3	1x4 = 4	1x5 = 5
B. low	2x1 = 2	2x2 = 4	2x3 = 6	2x4 = 8	2x5 = 10
C. moderate	3x1 = 3	3x2 = 6	3x3 = 9	3x4 = 12	3x5 = 15
D. significant	4x1 = 4	4x2 = 8	4x3 = 12	4x4 = 16	4x5 = 20
E. High	5x1 = 5	5x2 = 10	5x3 = 15	5x4 = 20	5x5 = 25

Catatan:

- 1-4 = Low Risk safe
- 5-9 = Medium Risk
- 10-16 = High Risk
- 20-25 = Very High Risk

	<i>Extreme Risk - Immediate Action where Senior Management get Involved</i>
	<i>High Risk - Management Responsibility should be specified</i>
	<i>Moderate Risk - Managed by Specific responsible person</i>
	<i>Low Risk - Managed by routine process</i>

Dampak

Hasil dari kejadian yang mempengaruhi tujuan kegiatan dapat dinilai dalam skala dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi dalam skala bilangan pengaruh positif maupun negative, baik pasti maupun tidak yang dinilai secara kuantitatif atau kualitatif. Sebuah kejadian dapat menimbulkan konsekuensi. Berikut dampak utama: Reputasi, jadwal dan kualitas data.

Tabel 3.2 Level Dampak pada Reputasi, Kualitas dan Jadwal

		Reputational Impact	Quality	Schedule
5 Severs	A Risk event that, if it occurs, will have a severe impact on achieving desired results, to the extent that one or more of its critical outcome objective will not be achieved	Loss of Government confidence Loss of market confidence Loss of trust, e.g. States & Ministries Extensive media coverage High-level ministerial enquiry [or resignation] Financial and legal penalties	The impact on quality is critical . Risk occurring would reduce quality of desired outcomes to such an extent that it negates benefits of activity	Key program event or milestone delayed by more than 3 months. Minimal or no impact

4 Significant	A Risk event that, if it occurs, will have a significant impact on achieving desired results to the extent that one or more stated outcome objective will fall below acceptable levels.	Strained Government relationships Temporary loss of market confidence Moderate media coverage Ministerial enquiry Strained relationships with taxpayers and the discouragement of them to pay taxes	The impact on quality is high . Risk occurring would significantly detract from the original desired quality of the outcomes and may reduce the viability of the activity as outcomes require revision.	Increase critical path schedule by 2-3 months, Budget increase or unit production cost increases > (1% of budget)
3. Moderate	A Risk event that, if it occurs, will have a moderate impact on achieving desired results, to the extent that one or more stated outcome objectives will fall well below goals but above minimum acceptable	Increased Government attention Market confidence not affected Minor, if any, media attention Major attention within MoF Holder's deposit and taxpayers confidence is moderately affected	The impact on quality is medium . Risk occurring would detract from the desired quality of the outcomes but not detract from the overall purpose of the activity.	Moderate schedule slip 1-2 month schedule slip , Budget increase or unit production cost increase > ** 5% of budget

2. Minor	A Risk event that, if it occurs, will have a minor impact on achieving desired results, to the extent that one or more stated outcome objective will fall below goals but well above minimum acceptable levels	Some Government attention No media coverage Internal MoF enquiry Taxpayers' attention	The impact on quality is low. Risk occurring would detract slightly from the desired quality of the outcomes.	Minor schedule slip. Non critical path activities late; impact on critical path up to 1 month slip, Budget
1. Minimal	A risk event that, if it occurs, will have little or impact on achieving out come objective.	Government and market relationships intact No media coverage	The impact on quality is very low. Risk occurring would represent a minor revision to planned outcomes.	Schedule not affected ; schedule adjustment can be managed within plan. Able to meet key milestone with not schedule float, Exceeds budget increase or unit production cost threshold

Source: Storkey, I.2011. Operational Risk Management and Business Continuity Planning for Modern State Treasuries Fiscal Affairs Department; Qualitative analysis, http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_516/L04%20Qualitative%20Risk%20Analysis.pdf

3.4. Hasil Review

Analisis risiko diperlukan dalam melakukan kegiatan penanganan risiko, dapat dilakukan prioritas penanganan, semakin tinggi level risiko semakin besar pengaruhnya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sehingga perlu dilakukan manajemen risiko agar kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik. Adapun level risiko diperoleh dari hasil observasi dan diskusi dengan responden dengan kepala sub bagian tata usaha, Bendahara, staf tata usaha, operator SIMAK BMN, operator SAIBA, Operator Persediaan dan Operator RKAKL, mereka ditanyakan langsung frekuensi dan dampak terjadinya risiko tersebut selama 5 tahun terakhir. Hasil review ini diperoleh penilaian risiko atau analisis risiko.

Metodologi yang digunakan menggunakan Probability Impact Matrix, merupakan metodologi yang sering digunakan dalam metode kualitatif untuk menghitung risk assessment. Menurut Hillson and Hulett 2004) dikatakan bahwa Risiko dibagi kedalam dua dimensi ketidak pastian dan dimensi dampak. Demikian analisis resiko yang tepat memerlukan penilaian kedua unsur ini dengan tepat.

Risk = dampak X frekuensi

Perhitungannya sangat sederhana. Langkah pertama mendefinisikan probabilitas kejadian resiko, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan magnitude dari dampak, sehingga diperoleh exposure sebuah kegiatan terhadap resiko. Hasil level resiko dari tahapan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan diperoleh:

1. Pengarsipan terhadap bukti transaksi tidak segera dilakukan atau sering menunda melakukan pengarsipan merupakan level risiko tertinggi. Selain itu pada posisi kedua diikuti kesalahan dalam pembebanan akun belanja yang dilakukan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

2. Penentuan orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan dalam menangani risiko adalah yang berkaitan dengan tupoksi dan jabatan, untuk warna merah dan kuning ditangani level administrator sedangkan untuk level biru dan hijau dapat ditangani oleh orang yang berhubungan dengan tupoksi.
3. Risiko yang terkecil bukan berarti dapat diabaikan, namun bukan merupakan prioritas utama kegiatan manajemen risiko.
4. Semakin tinggi level risiko semakin membutuhkan monitoring sedangkan semakin tinggi frekuensi risiko memerlukan manajemen.

Tabel 3.3 Risk Level Hasil kegiatan pengelolaan administrasi keuangan

No.	Risiko	Kegiatan	Likelihood	Impact	Score	Level
1.	Dokumen	Risiko kehilangan bukti pembayaran	5.00	4.25	21.25	
2.	Analisis	Kesalahan dalam pengelompokan akun belanja	3.25	4.25	13.81	
3.	Dokumen	Risiko dokumen kontrak belum selesai	4.00	3.00	12.00	
4.	Dokumen	Risiko menunda pengadministrasian bukti	2.50	4.50	11.25	
5.	Analisis	Risiko tidak ada konfirmasi penggunaan	1.75	6.00	10.50	
6.	Dokumen	Risiko dokumen bukti dan belanja belum dilakukan scan	3.00	3.00	9.00	
7.	Kebijakan	Risiko anggaran dibloking	2.00	4.50	9.00	
8.	Analisis	Apakah ada data yang tidak wajar pelaporan keuangan	2.00	4.50	9.00	
9.	Dokumen	Risiko kelengkapan bukti dan nota	1.50	5.75	8.63	

10.	Kebijakan	Risiko tidak memberikan informasi keuangan yang lengkap	1.25	3.25	4.06	
11.	Analisis	apakah indikator penggunaan akun sudah	1.17	3.33	3.89	
12.	Dokumen	Apakah data keuangan tidak konsisten saat dilakukan analisis	1.50	2.50	3.75	

3.5. Penanganan Risiko

Perlakuan risiko adalah proses memilih dan menerapkan langkah-langkah untuk memodifikasi risiko. Perlakuan risiko mencakup unsur utamanya, pengendalian / mitigasi risiko, namun berlanjut lebih jauh, misalnya, penghindaran risiko, diterima, dikurangi, dibagi transfer risiko, pembiayaan risiko, dll.

Dalam penanganan risiko pada pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni dengan cara penghindaran risiko dan dikurangi risiko. Penghindaran risiko merupakan strategi dimana risiko diketahui dampak yang sangat besar dan luas dan sulit atau tidak dapat dikendalikan, sedangkan pengurangan risiko merupakan tindakan mengurangi risiko yang sudah diketahui dan akan terjadi pada yang akan datang.

Pada hasil review pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir diketahui bahwa risiko dokumen berupa kehilangan bukti pembayaran atau nota pembelian merupakan risiko yang memiliki level risiko paling tinggi berwarna merah sehingga risiko ini bisa kita hindari dengan cara melakukan pengarsipan bukti dan nota pembelian tepat waktu atau real time, kemudian diikuti oleh risiko lainnya berupa risiko dokumen dan analisis berwarna kuning. Dan untuk penanganan

risiko dengan cara mengurangi bisa dilihat bahwa dari hasil review menyebar pada setiap risiko dokumen, kebijakan dan analisis yang berwarna hijau dan biru.

Dalam penanganan risiko ini harus dilakukan sesuai dengan tahapan penanganan risiko dimana yang berkaitan dengan tupoksi dan jabatan, untuk warna merah dan kuning ditangani level administrator sedangkan untuk level biru dan hijau dapat ditangani oleh orang yang berhubungan dengan tupoksi. Dan upaya monitoring dan evaluasi terhadap risiko harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko yang akan terjadi karena risiko selalu berkembang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Manajemen Risiko mutlak diperlukan dalam berbagai kegiatan di Pemerintahan karena dapat mengantisipasi suatu kejadian sehingga dampaknya dapat dikurangi, dicegah atau dihindarkan.
2. Skor risiko dapat menentukan tanggung jawab terhadap risiko tersebut atau tingkat level risiko, semakin tinggi level risiko semakin penting upaya untuk menanggulangi risiko tersebut.
3. Level risiko diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden.
4. Level risiko tertinggi pada kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan level risiko berwarna merah dan kuning.
5. Monitoring dan evaluasi risiko sangat penting dilakukan karena risiko selalu berkembang dan dapat dilakukan tindakan dalam mengurangi risiko.

4.2. SARAN

Setelah mendapatkan hasil dari review manajemen risiko pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, adapun saran yang bisa diberikan yakni:

1. Seluruh Bukti Pembayaran dan Nota Pembelian terkait dengan pengeluaran anggaran harus segera diarsip dan tidak boleh dilakukan penundaan, karena hal ini akan menyebabkan risiko kehilangan bukti pembayaran dan nota pembelian yang ada dan merupakan risiko tertinggi yang terjadi.
2. Dalam Pengelolaan administrasi keuangan sebaiknya diberikan informasi yang memuat seluruh transaksi yang terjadi dalam pengungkapan laporan transaksi keuangan.
3. Pengawasan pada pengelolaan administrasi keuangan perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan karena pengawasan sangat riskan sekali terhadap kualitas pengelolaan administrasi keuangan.
4. Risiko yang kecil tetap perlu menjadi perhatian dan tidak bisa diabaikan karena setiap risiko yang ada akan mempengaruhi dalam kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.
5. Seluruh pegawai yang terlibat baik dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun yang tidak terlibat secara langsung perlu bekerja sama dalam mencegah dan menangani setiap masalah yang timbul dari setiap risiko yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

Charter institute management accountant. 2008. *Fraud risk management A guide to good practice.*

Hillson, D. A., Hulett D. T.,2004. *Assessing Risk Probability: Alternative Approaches* , PMI Global Congress Proceedings – Prague, Czech Republic,

Institute of Risk Management.2008. *A risk Management Standard*

Maiorescu, t. et. aL .2013. *Using Probability Impact Matrix in Analysis and Risk Assessment Projects.* Scientific Papers Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology.

PricewaterhouseCoopers(Pwc).2004. *The Tax Risk Management* : PricewaterhouseCoopers LLP is 1 Embankment Place London WC2N 6RH.

Qualitative analysis,
http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/alkhalil/PDF_CEM_516/L04%20Qualitative%20Risk%20Analysis.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

Pedoman Penilaian Risiko ini melengkapi Pedoman Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub Unsur Analisis Risiko dalam penyelenggaraan Penilaian Risiko di lingkungan BPKAD Prov Sumsel.

A. LATAR BELAKANG

Kepala BPKAD telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKAD Nomor 18/PER/B3/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BPKAD untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub- unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Untuk Penilaian Risiko, dibutuhkan Pedoman yang meliputi langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko termasuk metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Pedoman Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level, yaitu: Strategis/Kebijakan, Organisasional dan Operasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPKAD, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif dalam penilaian risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. Bahan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan BKKBN.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko di lingkungan BPKAD meliputi tiga tingkat tindakan dan kegiatan, yaitu:

1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada

aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Kepala BPKAD, terkait dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKAD.

2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPKAD Pusat dan Perwakilan BPKAD Provinsi, terkait dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran unit organisasi Eselon I dan Eselon II yang relevan/selaras dan mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional BPKAD, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana, Pejabat Unit Akuntansi beserta para Pejabat Perbendaharaan, termasuk Unit Layanan Pengadaan di BPKAD, terkait dengan tugas dan fungsi suatu unit kerja yang bersifat substansi maupun generik.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian pada ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

BAB II

PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran di lingkungan BPKAD. Konsepsi ini menuntut adanya prakondisi agar proses identifikasi dan analisis risiko dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai karakteristik Penilaian Risiko berdasarkan PP 60 Tahun 2008 yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian risiko.

A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60 TAHUN 2008

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: Pertama, identifikasi risiko, dan Kedua, analisis risiko. Proses penilaian risiko, bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.

Dalam hal ini, kriteria penilaian risiko di lingkungan BPKAD adalah tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra dan RKT BPKAD yang juga menjadi acuan kegiatan operasional, sesuai dengan konteks/ruang lingkupnya yaitu konteks strategis, organisasional dan operasional.

B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGA- RAAN SPIP

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan- kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP BPKAD. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi untuk menyelenggarakan SPIP. Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan organisasi yang sesuai dengan konteks risiko. Unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun quick win penyelenggaraan SPIP. 1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko. Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran

BPKAD sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko, sebagai berikut:

- a. Tujuan telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD.
- b. BPKAD telah menetapkan prioritas tujuan yang akan dicapai yaitu: pengamanan aset/BMN, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, serta efisiensi dan efektivitas operasional.
- c. Tujuan tersebut sudah memenuhi syarat:

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timeframe (SMART) dan telah selaras dengan visi, misi dan indikator kinerja.

2. Identifikasi Kegiatan Utama Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah juga wajib menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dalam hal ini sasaran kegiatan. Prasyarat ini diwajibkan untuk semua Kegiatan Utama Instansi Pemerintah atau kegiatan pendukung jika dianggap perlu. Secara khusus, Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain memberikan prasyarat yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan yaitu:

- a. Harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah.
- b. Harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah.
- d. Mempunyai unsur kriteria pengukuran.
- e. Didukung sumberdaya Instansi

Pemerintah yang cukup.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diatas, misalnya kegiatan di RKA tidak selaras dengan kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi pemerintah atau tidak selaras dengan Renstra instansi pemerintah, maka untuk kepentingan penilaian risiko atau penerapan unsur SPIP lainnya, kegiatan yang tidak selaras tersebut untuk sementara dimasukkan sebagai kegiatan ad-hoc di organisasi yang bersangkutan.

C. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Risiko dilakukan oleh suatu unit organisasi, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi, melalui Diagnostic Assessment (DA) atau temuan hasil audit atau reviu dari BPK, BPKP atau APIP. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil DA maupun temuan hasil audit atau reviu dari BPK atau APIP perlu dianalisis agar penilaian risiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan pengendalian intern ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya. Diagnostic Assessment juga menghasilkan area perbaikan (Areas of Improvement, disingkat AOI). Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk kearah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke unit organisasi mana yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya sub unsur Lingkungan Pengendalian. Dalam hal pelaksanaan Diagnostic Assessment dapat merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 500 Tahun 2010 tentang pedoman pemetaan (Diagnostic Assessment) terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kemana pun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja serta perencanaan akan berbasis kegiatan, maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur Lingkungan Pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan Lingkungan Pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi BPKAD.

Hal yang sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau APIP yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP. Tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, BPKAD harus menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada.

BAB III

PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian risiko dimungkinkan dengan penetapan tujuan dan identifikasi atas kelemahan pengendalian. Pemahaman tentang tujuan akan memudahkan penetapan konteks dan penetapan kriteria yang menjadi acuan dalam identifikasi dan analisis risiko.

A. PENETAPAN KONTEKS RISIKO

Tujuan BPKAD sebagaimana tertuang dalam Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada dua konteks di atas.

1. Konteks Strategis

Pencapaian tujuan BPKAD tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan BPKAD. Tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala BKKBN tersebut, harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaiannya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Strategis

Tujuan BPKAD secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKAD.

Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Strategis adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas- tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Output penetapan konteks strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, outcome yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor- faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (stakeholder) internal dan eksternal serta kriteria evaluasi risiko.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Strategis Langkah kerja penetapan konteks strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis instansi pemerintah dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang- undangan yang relevan dengan peran strategis organisasi, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar hasil identifikasi permasalahan SPIP pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern;
- 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja(KKPR –1.1 dan KKPR –1.3).

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan BPKAD secara organisasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit kerja Eselon I dan Eselon II. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pejabat pimpinan tinggi madya dan pertama BPKAD tersebut, harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional Tujuan BPKAD secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKAD.

Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakanyang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Organisasional Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses bisnis (business process) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan

unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;

2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan Satuan Kerja;

3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;

4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;

5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedures (KSOP);

6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak

terkait, ketentuan/ peraturan perundang - undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

7) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AOI) yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan Temuan BPK/APIP/ informasi pengelola/ lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah- langkah kerja sebagai berikut: a) Nilai dan kemungkinan

pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Satuan Kerja.

b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control).

8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR –1.1 dan KKPR –1.3).

3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan BPKAD pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b. Output Penetapan Konteks Operasional Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses bisnis kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

1) Dapatkan daftar setiap kegiatan

teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, RKA-KL, DIPA termasuk indikator sasarannya;

2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan Standard Operating Procedure (KSOP);

3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/ peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

4) Dapatkan ikhtisar Areas of Improvement (AOI) atau Temuan BPK/ APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:

a) Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (hard control) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Satuan Kerja.

b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (soft control).

5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR –1.1 dan KKPR –1.3).

B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Sesuai PP 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan di analisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain:

1. Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (successful measures) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
2. Dasar perumusan yaitu: aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
3. Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
4. Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.

Berdasarkan aspek - aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Risiko

Struktur analisis risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi: sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis risiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko, yaitu: konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan Disain Penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi Penilaian Risiko ini sekaligus dengan Kegiatan Pengendalian.

Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa: 5 M (Man, Money, Machine, Method, Material), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

2. Penetapan Kriteria Evaluasi Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya.

Kriteria Evaluasi Risiko yaitu keputusan oleh Pimpinan unit kerja Eselon I dan Eselon II Provinsi mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko, dengan mempertimbangkan: a) dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran; dan b) tujuan penyelenggaraan SPIP (kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien). Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

a. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu: dampak, probabilitas dan gabungan dampak- probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dipilih skala lima dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko.

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko harus dipilih sesuai dengan skala yang digunakan dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian risiko.

Jika menggunakan skala lima (Sangat Signifikan, Signifikan, Sedang, Kurang Signifikan dan Tidak Signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko.

c. Risiko/Skala Risiko

Matriks Risiko atau Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable).

Matriks ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih, 5x5 atau dengan skala lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian.

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yang digunakan oleh pengguna.

Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP, berikutnya Kegiatan Pengendalian.

C. PEMAHAMAN PROSES BISNIS

Pemahaman proses bisnis (Business Process) tidak diberikan penjelasan yang eksplisit di PP 60 Tahun 2008, namun efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses bisnis (business process) dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan SPIP dilakukan melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses bisnis yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses bisnis yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi- informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis risiko, sebagai berikut:

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses bisnis suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses bisnis ini ditempatkan secara

proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

2. Output Pemahaman Proses Bisnis

Output tahap Pemahaman proses bisnis adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang: alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

BAB IV

KESIMPULAN

Penilaian risiko terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu: identifikasi risiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat lembaga BPKAD dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa risiko, menganalisis risiko dan menghasilkan peta risiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks risiko.

Sebagai salah satu unsur Penilaian Risiko, Identifikasi Risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang: pemilik risiko, penyebab, pengendalian risiko yang sudah ada, dan penetapan sisa risiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Risiko yang memuat informasi Sisa Risiko yang perlu dibangun kegiatan pengendaliannya.

1. Prinsip Identifikasi Risiko

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Unit Kerja. Namun demikian, para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari risiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya.

Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

2. Output Identifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar Risiko yang memuat informasi tentang: peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada, dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

3. Langkah Kerja Identifikasi Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan, adalah sebagai berikut:

- a. Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;
- b. Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- c. Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/ Temuan Audit (KKPR 1.3), lakukan identifikasi risiko yang meliputi: peristiwa risiko, pemilik risiko, sumber, dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko (KKPR 3.1);
- d. Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
- e. Buatlah catatan-catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi;
- f. Adakan rapat internal (diskusi panel atau Focus Group Discussion (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian risiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR – 1.2. Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko- risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

Proses Identifikasi dan Analisis risiko pada setiap kegiatan di level Strategis, Organisasional maupun operasional menjadi sebuah langkah awal mewujudkan pengendalian kegiatan yang komprehensif.

Dengan pedoman penilaian risiko ini diharapkan setiap unit kerja di BPKAD dapat menyusun dokumen penilaian risiko masing-masing, sehingga setiap kegiatan yang ada dapat terpetakan risikonya, kemudian dapat dibuat rencana tindak pengendalian terhadap kemungkinan risiko tersebut.

PAPER
RESIKO OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT
GELUMBANG



O
L
E
H

NAMA : IRHAMNAH

NIM : 192510048

MATKUL : MANAJEMEN RESIKO SDM

DOSEN : Dr Fitriasuri, S.E., Ak., M.M

PROGRAM STUDI MANAJEMEN-S2
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
2020

Daftar Isi

Halaman Judul	
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Objek	3
Bab III Pembahasan	4
Bab IV Kesimpulan dan Saran	6
Daftar Pustaka	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Paper Manajemen Resiko SDM tentang Resiko Operasional Pada Kantor Camat Gelumbang. Dengan Paper Manajemen Resiko ini, kami mengharapkan agar Paper ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang menyusun, yang memanfaatkan maupun bagi pembaca. Karena penyusunan Paper ini guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko SDM, maka kami mengharapkan agar Paper ini dapat memberikan nilai yang memuaskan.

Palembang, November 2020

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perlu disusun rincian tugas dan fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di Kecamatan.
- b. Mengelola pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati.
- c. Mengelola penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan politik dalam negeri.
- d. Melayani masyarakat dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di kecamatan.
- e. Mengolah bahan ekonomi pembangunan di Kecamatan.
- f. Mengendalikan, memantau evaluasi dan membina kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di Kecamatan
- g. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan

Sesuai dengan rincian tugas dan fungsi Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang telah disebutkan diatas artinya setiap kegiatan tentu adanya risiko terutama risiko operasional. Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko berhubungan dengan ketidak pastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi trend utama baik dalam perbin cangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Setelah kita mengidentifikasi risiko maka

tindakan selanjutnya adalah mengukur resiko. Dengan mengukur resiko kita bisa mengetahui seberapa besar resiko itu. Hal ini penting, karena sebelum kita menentukan sikap untuk mengendalikan resiko terlebih dahulu kita mengetahui kadar resiko tersebut, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat bagaimana cara mengukur resiko dengan mudah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

1. Apa pengertian Resiko Operasional?
2. Bagaimana resiko operasional pada Kantor Camat Gelumbang

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa pengertian Resiko Operasional
2. Untuk mengetahui bagaimana resiko operasional pada Kantor Camat Gelumbang

1.4 Manfaat

1. Sebagai media belajar dan tambahan wawasan bagi penulis.
2. Memberikan informasi bagi pembaca.
3. Dapat memahami atau menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh

BAB II GAMBARAN OBJEK

Kecamatan Gelumbang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawan kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.

Struktr Organiasasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahn
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- f. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan Gelumbang terdiri dari 1 Kelurahan dan 22 Desa.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. Pemeliharaan ketente dan ketertiban umum

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Resiko Operasional

Dalam bab ini akan membahas pengukuran risiko operasional dan isu yang terkait. Masalah operasional akan dihadapi oleh Camat dan seluruh staf setiap tahun berjalan dimulai atau bahkan sebulan sebelum akhir tahun. Masalah operasional itu misalnya seperti memasang peralatan, menyusun system gaji, mengawasi bawahan, mengawasi kegiatan di bidang pemerintahan, trantip, pemberdayaan, kessos, serta di bagian pelayanan. Namun karakteristik risiko operasional belum dipelajari dengan baik dibanding dengan risiko lainnya sehingga pengukuran risiko ini pun juga belum baik.

Tanpa disadari Kantor Camat Gelumbang itu sebenarnya sudah mengenali risiko operasional, sebagai contoh Sekretariat atau bagian umum mengalami kesalahan pencatatan, system pengawasan internal yang kurang memadai, kegagalan system computer, dll. Risiko tersebut disebut juga risiko yang inherent yaitu risiko yang muncul pada saat melaksanakan kegiatan atau pelayanan. Namun adapun upaya Pemerintah Kecamatan untuk mengelola dan menurunkan risiko operasional misalnya seperti memperbaiki system, memberikan pelatihan kepada pegawai, dll.

Menurut Basel II (lembaga yang mengatur perbankan internasional), risiko operasional adalah risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, system atau kejadian eksternal.

3.2 Resiko Operasional pada Kantor Camat Gelumbang

Di dalam melaksanakan program kegiatan setiap tahun tentunya banyak mengalami risiko seperti :

a. **Kegagalan Proses Internal**

Risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau procedure internal organisasi.pada Kantor Camat Gelumbang, contohnya seperti risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi, kesalahan pencatatan administrasi, pengawasan yang kurang memadai, pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi.

b. **Risiko Kegagalan Mengelola Manusia (Staf)**

Staf merupakan asset penting bagi untuk Pemerintahan Kantor Camat Gelumbang, namun juga menjadi sumber risiko operasional baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh yang tidak disengaja misalnya kesalahan pada SPJ yang kurang lengkap dokumentasinya, dan yang sengaja misalnya penggelapan kas kantor. Hal tersebut mencakup semua elemen organisasi seperti system pengawasan, procedure operasional, kualifikasi staf yang kurang (moral yang tidak baik). Untuk itu

risiko manusia mengharuskan Kantor Camat mempunyai staf yang mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integritas yang diperlukan.

c. Risiko Sistem

Sistem teknologi memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kantor Camat Gelumbang, namun juga bisa menjadi sumber risiko baru. Jika Kantor Camat Gelumbang bergantung pada system computer maka akan semakin tinggi risiko yang berkaitan dengan kerusakan computer. Contohnya : kerusakan data, kesalahan program, system keamanan yang kurang baik, penggunaan teknologi yang belum teruji, dan terlalu mengandalkan model tertentu untuk kebutuhan pelayanan.

d. Risiko Eksternal

Kejadian yang bersumber dari luar Kantor Camat Gelumbang dan di luar pengendalian organisasi. Contohnya : perampokan, bencana alam.

BAB IV KESIMPULAN dan SARAN

4.1. Kesimpulan

Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, ada pepatah mengatakan tak ada hidup tanpa risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

4.2 Saran

Sebagai pegawai seharusnya kita lebih memahami bagaimana sebenarnya konsep dan cara mengidentifikasi sebuah risiko, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan yang akan kita ambil dengan risiko yang paling kecil.

DAFTAR PUSTAKA

<http://agungfaris.wordpress.com/2012/10/23/pengukuran-resiko/http://anaksholeh10.blogspot.com/2013/10/makalah-pengelolaan-dan-pengukuran.html>

-
Nugroho, A. (2013) Prinsip-Prinsip Pengidentifikasian Risiko. [online]. Tersedia : <http://masgug.blogspot.co.id/2013/05/blog-post.html>. Fandini, S.D. (2011) Cara Mengidentifikasi Risiko. [online]. Tersedia : <http://nyaritugas.blogspot.co.id/2011/12/cara-mengidentifikasi-resiko.html> Mulyana, D. (2011) Prinsip2 Pengidentifikasian Risiko. [Online]. Tersedia : <https://deden08m.files.wordpress.com/2011/09/kuliah-3-prinsip2-pengidentifikasian-risiko.pdf>. [27 Agustus 2017]. Nugroho, A. (2013) Daftar Kerugian Potensial. [Online]. Tersedia : <http://masgug.blogspot.co.id/2013/05/blog-post.html>. [27 Agustus 2017].

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terkait dengan perkembangan yang terjadi pada istilah manajemen, dikenal juga istilah management asset yang nantinya digunakan untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh negara. Manajemen aset itu sendiri adalah suatu kondisi yang menggambarkan tentang suatu pengelolaan aset yang baik dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk memberikan keyakinan mengenai nilai dari suatu asset dalam satuan mata uang dan juga untuk mengatur mengenai jumlah minimum pengeluaran (lebih dikenal dengan istilah efisien). Sedangkan asset itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah entitas baik itu swasta atau pemerintah pusat dan mampu meningkatkan nilai.

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Esensi utama dari peraturan adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan Barang Milik Negara diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah mutlak diperlukan karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadaan Barang Milik Negara yang diperlukan harus benar-benar sesuai dan terbatas pada yang diperlukan saja dengan maksud menghindari pemborosan keuangan Negara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 MANAJEMEN ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A 34

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengertian mengenai BMN berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D, adalah sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Manajemen Aset didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses manajemen planning, organizing, leading dan controlling. bertujuan mendapat keuntungan dan mengurangi biaya (cost) secara efisien dan efektif. Dalam pengelolaan suatu kekayaan diperlukan ilmu manajemen yang khusus dan spesifik mengelola kekayaan (asset) seperti yang kita ketahui banyak aset yang tidak maksimal dalam pemanfaatannya, disini sangat diperlukan kompetensi pengelola aset atau manager asset. untuk saat ini di indonesia pengelolaan aset physic masih belum di implementasikan dengan baik. bukan hanya perusahaan tapi juga di pemerintahan, melihat potensi yang harus dikelola manajemen aset sangat spesifik mengatur dan mengelola kekayaan.

Berbagai pengertian mengenai manajemen aset tersebut mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-upgrade, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan (1) mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, (2) mengidentifikasi kebutuhan dana, (3) memperoleh aset, (4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, (5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A 34

Proses manajemen aset dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data yang ada, melakukan inspeksi atas penugasan yang telah diberikan, inspeksi atas sumber daya yang digunakan, biaya, yang terjadi. Harus dilakukan akomodasi terhadap pemerintahan yang ada sehingga semua permasalahan yang timbul akan dapat dikendalikan. Kegiatan manajemen aset dimulai dari kegiatan identifikasi aset, menentukan rating dan melakukan investarisasi aset, penilaian atas kondisi aset serta penilaian atas aset itu sendiri, mencatat sisa hidup aset, siklus pembiayaannya dan menganalisis kesenjangan yang ada. Disamping itu juga harus dilakukan monitoring atas kondisi aset dan audit serta persiapan rencana kerja manajemen aset.

Selain itu juga harus dilakukan identifikasi atas kebutuhan aset dengan mempertimbangkan persyaratan yang berlaku di masyarakat, ketentuan yang berlaku termasuk atas pemeliharaan dan rehabilitasi yang sedang dilakukan, agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses kegiatan manajemen aset juga ditujukan kepada operasional aset tersebut dan sampai dengan dialihkannya aset tersebut kepada pihak lain apabila telah tidak dibutuhkan lagi dan tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya (disposal). Untuk praktisnya, maka dalam manajemen aset dilengkapi dengan siklus kehidupan manajemen aset, suatu alat yang praktis untuk melakukan identifikasi, mengkwantifikasi dan memprioritaskan penundaan pemeliharaan pada suatu fasilitas, dan mengembangkan rencana reduksi penundaan pemeliharaan secara rinci untuk mengakomodasikan tersedianya pendanaan. Rencana tersebut mengidentifikasi dan mengkwantifikasi kondisi suatu fasilitas saat ini, kondisi yang diinginkan di masa mendatang, dan bagaimana kondisi mendatang itu dicapai baik dalam kaitannya dengan tugas pemeliharaan dan biaya yang tersedia.

Untuk pencapaian tujuan dalam manajemen aset diperlukan penggunaan perencanaan manajemen strategis berupa rencana panjang bagi organisasi dengan mengakomodasikan visi, misi dan penciptaan nilai organisasi, kebijakan bisnis, persyaratan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan, tujuan organisasi serta manajemen risiko.

2.2 SIKLUS MANAJEMEN ASET

Secara umum, manajemen aset baik di perusahaan maupun pemerintahan meliputi aktivitas inti sebagai berikut : perencanaan (planning), perolehan (acquisition), pemanfaatan (utilization), dan penghapusan (disposal). Siklus manajemen aset membedakan dari input sumber daya lainnya, yang secara khusus tanggung jawab untuk keputusan pengadaan dan biaya dalam suatu organisasi, berbeda dengan tanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan aset.

2.3 PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN ASET

Prinsip-prinsip manajemen aset diturunkan dari pengertian umum dan didasarkan pada pendekatan siklus manajemen. Asumsi utama yang mendasari prinsip-prinsip manajemen aset adalah bahwa aset ada hanya untuk mendukung penyediaan pelayanan. Kepentingan terhadap rencana aset akan terlihat di saat manajemen mengakui bahwa aset fisik merupakan sumber daya yang vital bagi organisasi. Aplikasi yang efektif dari prinsip-prinsip manajemen aset akan memastikan input sumber daya tersebut pada biaya terendah. 5 Prinsip – prinsip manajemen aset tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Karmila Utari

NIM : 192510001

Kelas : Reguler A 34

1. Keputusan manajemen aset adalah keputusan yang terintegrasi dengan perencanaan strategis,
2. Keputusan perencanaan aset didasarkan atas evaluasi berbagai alternative yang mempertimbangkan biaya siklus hidup aset, manfaat, dan resiko kepemilikan,
3. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja,
4. Keputusan penghapusan didasarkan pada analisis terhadap metode-metode yang menghasilkan tersedianya pengembalian bersih dalam kerangka perdagangan yang wajar,
5. Struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset.

Perencanaan terintegrasi

Keputusan atas pengadaan atau penggantian aset, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan haruslah terintegrasi dengan perencanaan strategis. Hal ini dicapai dengan menghubungkan aset dengan perencanaan strategis. Hal ini dicapai dengan menghubungkan aset dengan standardan strategi penyediaan pelayanan.

Pengadaan

Kerangka perencanaan aset yang efektif menyertakan evaluasi atas berbagai alternative untuk pengadaan aset baru dengan penggantian aset yang telah ada. Evaluasi tersebut mencakup perbandingan biaya siklus manajemen aset.

Akuntabilitas untuk aset

Kerangka akuntabilitas yang efektif mengidentifikasi tanggung jawab atas aset. Tanggung jawab ini mencakup semua fase dari siklus hidup. Mekanisme tanggung jawab disusun terkait dengan kepemilikan, pengendalian (control) dan tanggung jawab untuk penggunaan, keamanan, kondisi dan kinerja aset.

Penghapusan aset

Kerangka penghapusan aset yang efektif menyertakan pertimbangan terhadap alternative penghapusan aset-aset yang berlebihan, usang, berkinerja jelek, atau tidak memberikan pelayanan. Alternative tadi harus dievaluasi dengan analisis biaya manfaat.

Pengendalian manajemen

Struktur pengendalian intern yang efektif akan membangun dan mendeklarasikan kebijakan dan prosedur aset dan menggunakan sistem informasi yang menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk membuat keputusan manajemen aset yang informative.

2.4 SASARAN MANAJEMEN ASET

Sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif penggunaan aset. Harapannya adalah pada solusi non aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya terendah. Jadi dengan manajemen aset akan dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanan atau tidak. Solusi non aset dimaksudkan sebagai alternative penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut serta menghindari alternative yang terfokus pada pengadaan aset yang tanpa disertai optimalisasi aset yang telah ada.

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A 34

Dengan tekanan atau keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menyediakan pelayanan, merupakan hal yang penting bagi manajer asset untuk memahami dan mengerti bahwa konsumsi asset merupakan hal yang nyata dan menjadi biaya yang signifikan dari penyediaan pelayanan. Aplikasi dari teknik biaya siklus hidup (life cycle costing) dan penyusunan kerangka akuntabilitas yang memadai merupakan hal yang integral untuk mencapai pemahaman tersebut. Implementasi yang efektif dari prinsip akan mengarahkan biaya-biaya penyediaan pelayanan kepada :

1. Penurunan permintaan terhadap asset baru dengan mengadopsi solusi non-aset.
2. Maksimalisasi potensi manfaat dari asset-aset yang telah ada,
3. Penekanan biaya keseluruhan dari pemilikan asset melalui penggunaan teknik biaya siklus hidup,
4. Memastikan perhatian atau focus yang tajam atas hasil dengan penyusutan pertanggung jawaban dan akuntabilitas yang jelas untuk asset.

Manajemen asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh asset. Asumsi yang mendasari adalah bahwa asset ada untuk mendukung penyediaan pelayanan.

2.5 TUJUAN MANAJEMEN ASET

Prawoto menjelaskan bahwa tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggannya namun dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan image yang baik kepada publik. Secara umum tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset dan pengaturan risiko serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya.

Tujuan utama dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas (organisasi) dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset, dan pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

Agar efektif, manajemen aset perlu dipertimbangkan sebagai aktivitas yang komprehensif dan multi disiplin yang terkait dengan kebanyakan faktor antara lain:

1. Siklus hidup aset dan prinsip-prinsip manajemen aset,
2. Kebutuhan dari para pengguna aset,
3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan,
4. Kerangka manajemen dan perencanaan organisasi,

Nama : Karmila Utari

NIM : 192510001

Kelas : Reguler A 34

5. Kelayakan teknis dan kelangsungan komersial,
6. Pengaruh eksternal atau pasar,
7. Persaingan permintaan dari para stakeholder dan kebutuhan merasionalkan operasi untuk memperbaiki pemberian pelayanan atau meningkatkan keefektifan biaya.

Manajer yang bertanggung jawab atas aset perlu mempelajari berbagai teknik untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Teknik-teknik itu berupa manajemen nilai, manajemen permintaan, penilaian ekonomis, dan manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri sangat penting karena menyokong berbagai keputusan penting tentang aset.

2.6 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ASET

1. Entitas

Asset harus dikontrol oleh entitas. Pada bagian ini, entitas didefinisikan sebagai bagian organisasi pemerintah yang didanai sebagai atau seluruhnya dari APBN/APBD. Menejer di entitas pelaporan diharapkan menggunakan laporan keuangan dan asset untuk membantu mereka dalam mengevaluasi dan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2. Kontrol

Suatu entitas dianggap mengontrol asset apabila entitas tersebut memiliki kapasitas untuk mendapatkan potensi pelayanan atau manfaat ekonomi di masa mendatang potensi pelayanan atau manfaat ekonomi di masa mendatang dari asset, dan dapat meniadakan atau mengatur akses entitas lain atas manfaat tersebut. Bagaimanapun, suatu entitas yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap asset-asset public itu sendiri namun juga termasuk dalam konteks menguasai asset-aset tersebut.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup mekanisme atau prosedur untuk menyakinkan bahwa seseorang atau organisasi telah bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Sebagai contoh, akuntabilitas financial mencakup kewajiban untuk menjelaskan bahwa pengeluaran yang dilakukan telah efisien, efektif, etis, dan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Entitas yang mengontrol asset bertanggung jawab atas manajemen yang mereka lakukan. Standar akuntansi pemerintahan berisi panduan atau pedoman untuk menentukan apakah entitas telah mengontrol asset, dan apakah asset itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan dari entitas tersebut. Seorang manajer bertanggung jawab atas perencanaan, manajemen dan kinerja dari asset-aset yang mereka control.

2.7 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ASET

Perencanaan asset merupakan hal yang penting bagi manajemen yang efektif atas bisnis yang ditekuni suatu entitas, yang merupakan fase pertama dalam siklus hidup asset. Kesesuaian antara kebutuhan asset dari suatu entitas dengan strategi penyediaan pelayanan entitas yang semestinya menghasilkan asset dengan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Perencanaan asset juga memberikan arah pada tindakan khusus seperti membeli asset baru yang diperlukan,

Nama : Karmila Utari

NIM : 192510001

Kelas : Reguler A 34

menjual asset baru yang diperlukan, menjual asset yang berlebihan, dan mengoperasikan serta memelihara asset tersebut secara efektif.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang masih memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi tidak mustahil untuk dilakukan apabila semua unsur mau melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dengan amanah dan komitmen yang tinggi. Bagaimanapun juga ke depan barang milik/ kekayaan negara harus dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, karena hal tersebut menjadi kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing kementerian/lembaga negara. Penataan pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan semangat good governance tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat karena mendapat dukungan politik dari pemerintah.

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah Negara ataupun daerah. Dengan mengelola aset secara benar dan memadai, pemerintah akan mendapatkan sumber dana. Dalam mengelola aset, pemerintah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah.

Dengan perencanaan kebutuhan aset tersebut, pemerintah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat.



MANAJEMEN RESIKO
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TUGAS: MANAJEMEN RESIKO

OLEH :

MARDESAH (192510016)

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG

2020

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut Soemarno pengertian risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan risiko menurut Hanafi, adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sehingga risiko dapat diartikan sebagai dampak negatif atas pencapaian tujuan. Terjadinya dampak negatif tersebut disebabkan dari keadaan yang tidak pasti, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Begitu juga di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Selatan juga rentan terhadap risiko. Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, kegagalan pelaksanaan program kegiatan pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kendala dan ketidakpastian akibat dari kegiatan sebuah organisasi biasa kita kenal sebagai risiko. Setiap orang sangat familiar terhadap risiko. Dalam perilaku sehari-hari setiap orang memahami akan datangnya suatu risiko akibat dari perkataan, perbuatan atau keadaan. Daya tahan organisasi pemerintah terhadap

kemungkinan timbulnya risiko tergantung pada bagaimana mempersiapkan diri secara sistematis terhadap risiko yang harus dihadapi. Kekuatan yang paling mendasar adalah terciptanya budaya risiko (risk culture) dimana sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses layanan kepada publik.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Penulisan Makalah ini adalah mengetahui resiko-resiko yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana manajemen resiko sehingga dapat meminimalkan resiko yang terjadi.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan

b. Fungsi Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha , urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. Pengelolaan data, pembinaan teknis dan program pembangunan pendidikan nasional;
4. Pengawasan, pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah
5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya

2.2 Struktur Organisasi

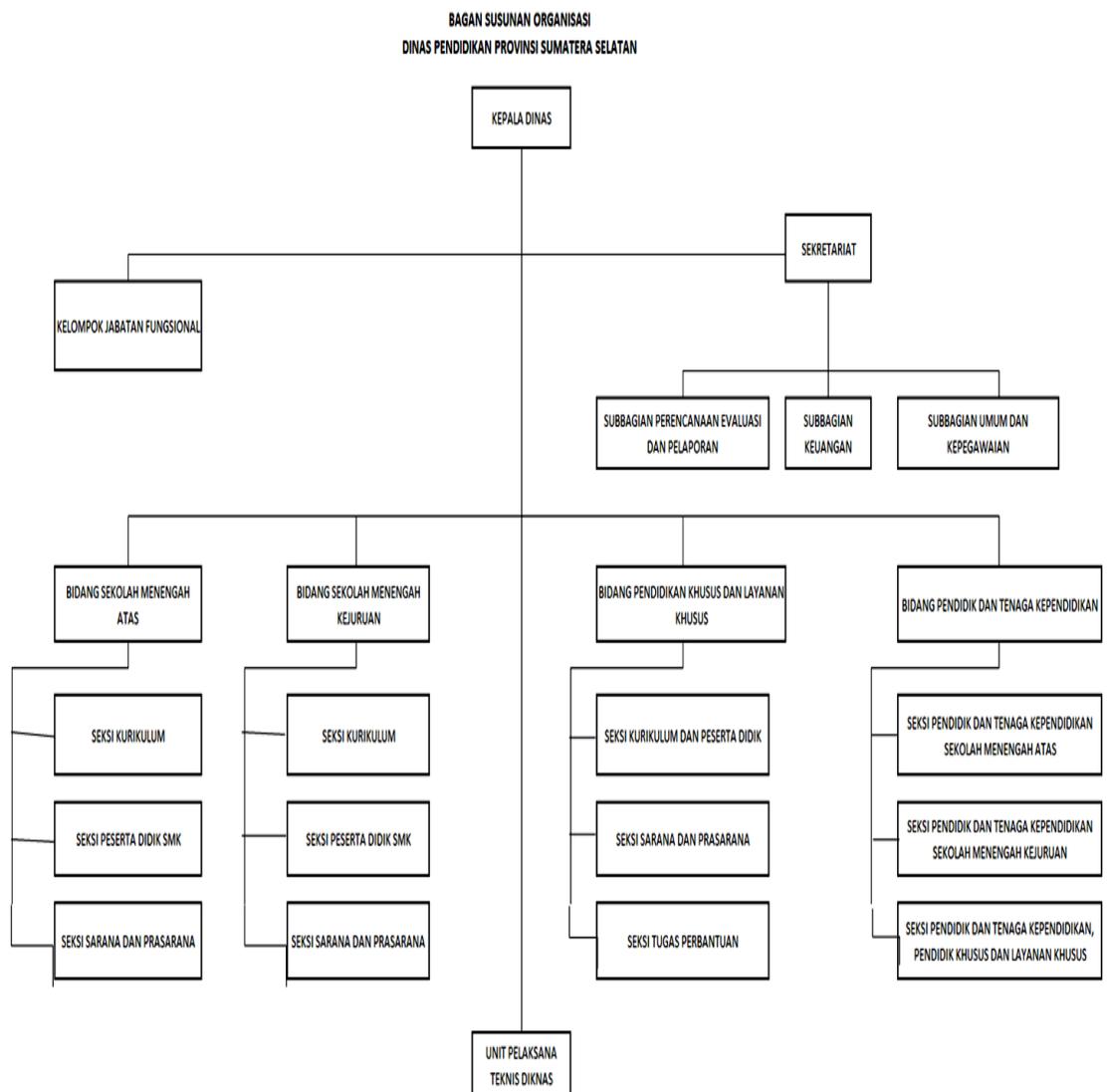
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan pembagian mengenai kewenangan dalam pengelolaan Pendidikan, untuk Dinas Pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB. Struktur organisasi Dinas Pendidikan diatur pada Pergub Nomor 52 tahun 2016, dengan struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan dan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahi
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Tugas Perbantuan
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.3 Visi dan Misi

Dalam jangka menengah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan tujuan pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Visi yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan adalah: “ **Mewujudkan layanan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas guna membentuk generasi yang berkarakter** ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan dan reformasi birokrasi pendidikan
2. Meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua jenjang tanpa diskriminasi
3. Memantapkan wajib belajar pendidikan 12 tahun dan merintis wajib belajar 16 tahun
4. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Resiko

Identifikasi Risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko – risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Untuk mengidentifikasi resiko yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan hal pertama yang harus dilakukan adalah :

1. Menentukan Unit Resiko di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Unit resiko yang sangat krusial di Dinas Pendidikan adalah bagian Keuangan dan Aset. Di bagian ini sangat perlu menjadi perhatian karena kesalahan kecil saja dalam menuliskan angka pada satu proses kerja akan berakibat fatal pada laporan keuangan.

2. Memahami proses

Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bagian Keuangan dan Aset harus memahami alur kerja dan cara kerja yang menjadi tugas mereka masing-masing. Ada banyak pekerjaan yang memerlukan kejelian dalam menginput data agar tidak mengalami kesalahan. Pekerjaan – pekerjaan rutin seperti memproses gaji bulanan, Kenaikan Gaji berkala, Tunjangan anak (KP4), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan pekerjaan bersifat Proyek APBD dan APBN sangat berisiko terjadi kesalahan penginputan data yang berisiko mengacaukan laporan keuangan. Apabila ada oknum yang melakukan manipulasi data dan tidak terdeteksi maka akan terjadi korupsi yang merugikan negara.

3. Menentukan aktifitas krusial

Semua pekerjaan yang menyangkut keuangan di Dinas Pendidikan adalah krusial karena menyangkut penghasilan Aparatur Sipil Negara dan proyek-proyek APBD berbentuk kegiatan ataupun pembangunan fisik.

4. Menentukan SDM yang terlibat

Untuk menjalankan proses kerja di bagian keuangan diperlukan orang – orang yang paham dengan proses kerja di bagian Keuangan.

5. Menentukan bentuk kerugian
Tentu saja bentuk kerugian di bagian keuangan adalah resiko terjadi kehilangan uang misalnya dicuri atau dikorupsi
6. Menentukan penyebab kerugian
 - a. Kelalaian Aparatur sipil Negara menyampaikan data
 - b. Resiko kebakaran yang menghilangkan data
 - c. Terjadi pencurian data oleh Hacker atau faktor intern.
7. Membuat daftar resiko yang berisi pernyataan resiko dan penyebab resiko, misalnya :
 - a. Resiko kesalahan dalam laporan keuangan karena tidak teliti menginput data
 - b. Resiko kehilangan uang karena kurang berhati-hati menyimpannya.
 - c. Resiko dana tidak dapat dicairkan karena saat jatuh tempo terlambat menyampaikan kelengkapan administrasi.

Sumber Informasi Risiko bisa didapatkan dari :

1. Dokumen Internal
Laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan prosedur operasi, dokumen SDM, surat perintah, dll.
2. Dokumen Eksternal
Misalnya: koran, majalah, data publikasi, statistic keuangan dan ekonomi, dan sumber lainnya.
3. Pihak Internal Perusahaan
Contoh: karyawan yang mengoperasikan Aplikasi SIMDA Keuangan selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten.
Pihak Eksternal Perusahaan (konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dll)

3.2 Mengukur Resiko

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan diawasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Secara kelembagaan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur Sumatera Selatan di bidang pengawasan yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka panjang 2008-2013 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan hasil dari Audit akan diumumkan sebagai Opini Audit yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

- Penjelasan tentang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) menurut SPAP adalah sebagai berikut: Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain.
- Laporan keuangan lengkap
- Tiga standard umum telah dipenuhi
- Bukti yang cukup telah diakumulasi yang menyimpulkan bahwa tiga standard lapangan telah dipatuhi
- Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
- Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjas atau modifikasi laporan

- Arti dari opini audit ini adalah auditor telah melakukan tes lapangan dan menganggap laporan keuangan telah dilakukan dengan benar dan terbebas dari kesalahan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion)

Pendapat yang diberikan oleh karena keadaan tertentu, yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Auditor menyediakan paragraf penjelasan dalam laporannya terhadap keadaan tertentu tersebut. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan).
- Laporan dipengaruhi oleh ketidak pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam
- mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
- Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) namun tidak disajikan.

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Jenis opini selanjutnya dalam opini audit adalah Opini Wajar Dengan Pengecualian, pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Pengecualian yang terjadi bisa disebabkan oleh hal berikut:

- Bukti kurang cukup
- Adanya pembatasan ruang lingkup

- Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).
- Dalam penulisan laporan opini auditnya seorang auditor akan memberikan penjelasan terhadap penyimpangan yang terjadi dan menyajikan poin-poin penyimpangannya.

4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Opini tidak wajar diberikan kepada laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pemberian Opini Tidak Wajar bisa mengindikasikan kecurangan yang dilakukan perusahaan mengenai posisi keuangannya. Perusahaan dengan audit opini tidak wajar akan dipaksa dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan dan pengauditan ulang.

5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Tipe opini audit terakhir adalah Opini tidak memberikan pendapat. Hal ini terjadi jika ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. laporan opini audit ini bukan lah laporan pendapat seorang auditor. Hal ini karena auditor sendiri tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurangnya kooperasi dari perusahaan atau hal lainnya, dan laporan yang dibuat disini hanya berisi penjelasan atas prihal tersebut dan bukan merupakan opini audit terhadap laporan keuangan itu sendiri.

3.3 Teknik Manajemen Risiko

Dalam mengelola risiko pada suatu organisasi sangat tergantung dari hasil identifikasi risiko yang mungkin muncul/terjadi pada organisasi tersebut, serta beberapa nilai kerugian bila hal tersebut terjadi dan yang terakhir adalah frekuensi (probabilitas) kejadian tersebut terjadi. Berikut ini beberapa alternative pilihan dalam mengelola suatu risiko dalam dunia bisnis :

1. Penghindaran Risiko (Risk Avoidance)

Alternatif risiko ini pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan.

2. Menahan atau menanggung risiko (Risk Retention)

Dimana perusahaan menanggung sendiri risiko yang terjadi, namun demikian, perusahaan tetap berupaya agar risiko tidak terealisasi /terjadi atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi.

3. Penahan yang tidak direncanakan dan yang direncanakan

Penahan yang direncanakan adalah upaya untuk mengetahui risiko yang mungkin timbul, atau mengidentifikasi risiko yang ada kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Pada kondisi ini tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak dialihkan pada pihak lain atau pihak ketiga diluar perusahaan. Sedangkan penahan yang tidak direncanakan adalah merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sehingga pada saat risiko itu terjadi perusahaan tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki tindakan yang telah terencana dalam mengatasinya.

4. Pendanaan risiko yang ditahan

Risiko yang ditahan bisa di danai dan bisa juga tidak di danai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan khusus yang ditujukan untuk mendanai risiko

tertentu, jika risiko tersebut tidak muncul maka risiko tersebut tidak di dani. Dalam beberapa situasi, alternatif tersebut merupakan pilihan yang masuk akal.

5) Pengalihan Resiko (Risk Transfer)

Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain (mentransfer risiko ke pihak lain). Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara yaitu Asuransi, Hedging, Incorporated, dan Teknik lainnya.

Dalam memajemen Resiko, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memilih alternatif Penghindaran Risiko (Risk Avoidance) Menahan atau menanggung risiko (Risk Retention). Jadi Dinas Pendidikan melakukan langkah-langkah tindakan untuk mencegah terjadinya resiko dan apabila terjadi kerugian karena suatu kejadian akan menanggung resiko sendiri. Para Aparatur Sipil Negara di setiap bidang khususnya bagian keuangan dituntut bekerja hati-hati dan jeli untuk mencegah kesalahan dalam bekerja menginput data dan membuat laporan keuangan beserta bukti-bukti Laporan seperti Kontrak, Kwitansi, Nota, Bill Hotel, Tiket kendaraan, tiket Pesawat, SK-Sk, dan lain sebagainya. Bukti – bukti SPJ harus disimpan dan ketika ada pemeriksaan Inspektorat mereka harus siap. Contoh lain adalah sewaktu terjadi kebakaran di lantai 3 di Bidang SMK pada bulan Oktober 2020 yang diakibatkan oleh korsleting listrik maka Dinas Pendidikan menggunakan dana APBD perubahan untuk merehabilitasi kerusakan gedung. Bagian perencanaan dan bagian keuangan segera memproses proyek rehabilitasi gedung menggunakan dana APBD. Tidak ada asuransi yang menanggung biaya rehabilitasi karena memang tidak ada kerja sama. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kejadian kebakaran kembali maka Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selalu diingatkan untuk mematikan seluruh aliran listrik pada komputer dan saklar lampu apabila pulang kerja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera selatan diawasi oleh Inspektorat Daerah untuk meminimalkan terjadinya resiko kerugian negara. Selain diawasi oleh Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan juga menghimbau para Aparatur Sipil Negara di lingkungannya agar bekerja hari-hati sesuai tupoksi dan meminimalkan resiko.

4.2 Saran

Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan asuransi untuk mentransfer resiko terhadap hal-hal yang tidak diinginkan misalnya resiko kebakaran gedung kantor dan ancaman kerugian akibat faktor eksternal lain seperti bencana alam gempa dan huru-hara pelaku demonstrasi.

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
Mata Kuliah : Manajemen Risiko
Dosen Pengajar : Dr. Fitriasuri, S.E, Ak, M.M
Kelas : 34-A

UJIAN AKHIR SEMESTER

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam era globalisasi dewasa ini di mana perekonomian berkembang dengan pesat, perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa bank adalah tempat untuk menyimpan atau meminjam uang bagi yang membutuhkan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank BUMN yang memiliki komitmen memenuhi permintaan dari masyarakat terhadap pelayanan perbankan syariah. Untuk mewujudkan visinya menjadi “*universal banking*”, pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka unit usaha syariah dengan membuka 5 kantor cabang syariah di kota-kota besar yang memiliki potensi untuk tumbuhnya perbankan syariah. Saat ini BNI Syariah memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama gerainya (*office channeling*).

Dengan pesatnya pertumbuhan unit usaha syariah dan setelah mendapatkan persetujuan para pemegang saham, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi melakukan pemisahan (*spin off*) atas unit usaha syariah dari induk menjadi bank umum syariah pada pertengahan Bulan Juni 2010. Bank Indonesia telah memberikan dukungan untuk berdirinya BNI Syariah sebagai bank umum syariah dengan telah diberikannya izin prinsip dan usaha untuk beroperasi. Izin prinsip untuk menjadi bank umum syariah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2008. Pemberian izin beroperasinya BNI syariah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun

2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah, Pemerintah dan Bank Indonesia mendorong untuk semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia melalui peraturan dan kemudahan, dengan dukungan tersebut perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertansaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008, Pasal 2 dan 3).

Seiring dengan meningkatnya produk pembiayaan, produk-produk simpanan atau penghimpunan dana juga berkembang dengan pesat. BNI Syariah menyadari bahwa masyarakat yang menghendaki layanan perbankan yang memiliki fasilitas perbankan yang nyaman, adil dan modern. Melihat fenomena pesatnya pertumbuhan produk pada BNI Syariah khususnya pembiayaan maka tidak berlebihan apabila tingkat risiko pembiayaan menjadi topik kajian utama dalam studi kasus pada penyusunan tesis ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dewasa ini terus menunjukkan eksistensinya ditunjukkan dengan mulai tumbuhnya industri perbankan syariah yaitu perbankan yang proses bisnisnya dijalankan dengan mengacu pada norma-norma syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah memiliki *core business* di sisi *funding* dan *lending* yang merupakan aktivitas utama sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana.

Perbankan syariah memberikan alternatif transaksi perbankan dalam rangka mengembangkan sistem perbankan Indonesia yang lebih maju dan modern. Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada layanan perbankan syariah yang telah terbukti memberikan kesejahteraan masyarakat terutama pada saat terjadinya krisis. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja bank

syariah yang tetap bagus pada saat krisis melanda bangsa.

Diharapkan baik yang dapat diperkirakan (*expected loss*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*). Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menetapkan beberapa kewajiban bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko antara lain : pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Jenis risiko bank syariah menurut Risk Management Guide IFSB Tahun 2004, pertama risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi yang sebagaimana terdapat pada bank konvensional, kedua *equity investment risk* terkait dengan *sharing* risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah *partnership* (*syirkah*), ketiga *rate of return risk* terkait dengan perubahan ekspektasi *return* pemilik dana investasi.

Secara umum potensi perbedaan karakteristik risiko pada bank syariah (dibandingkan bank konvensional) bersumber dari kewajiban memenuhi prinsip syariah maupun dampak dari variasi akad yang digunakan. Kajian Bank Indonesia menyimpulkan di samping risiko perbankan secara umum perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal : Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investment risk*), risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan *return* (*rate of return risk*), *market risk* yang spesifik dari perubahan harga persediaan, *legal risk* yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah, risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank.

Namun demikian pemberian pembiayaan tersebut memiliki risiko kerugian yang cukup besar. Pada prinsipnya transaksi pembiayaan syariah terdiri dari dua kelompok besar yaitu yang bersifat *certainty contract* dan *uncertainty contract*. Transaksi yang bersifat *certainty contract* biasanya berbasis jual beli (*murabahah*), jual beli dengan pesanan

(*istisna*), serta yang bersifat *uncertainty contract* yaitu transaksi yang berbasis bagi hasil. Transaksi dengan bagi hasil atau *profit loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 6/8/PBI/2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 Tentang Penilaian Kesehatan Bank, *Capital Asset, Manajemen, Equity, Liabilities* (CAMEL), risiko yang dihadapi bank menjadi 8 kategori antara lain : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

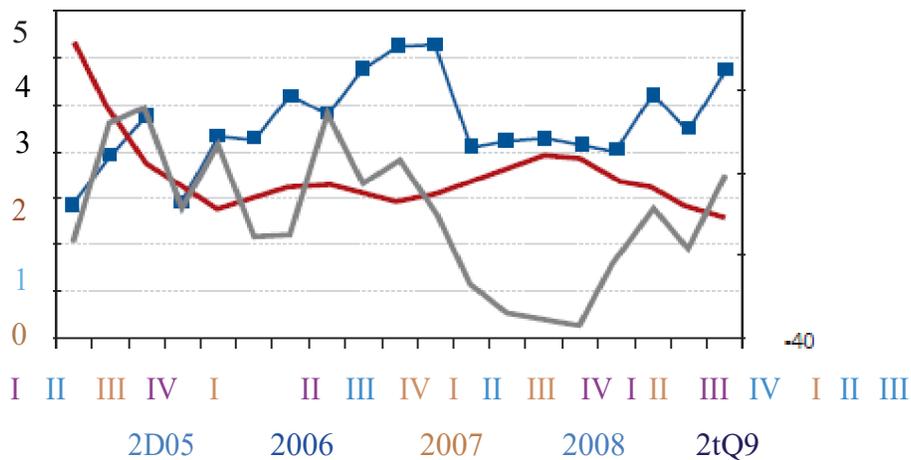
Dalam pengambilan keputusan pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari risiko strategis dan risiko kepatuhan atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan kepada debitur yang memiliki hubungan istimewa atau terkait dengan bank, ditetapkan peraturan yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan bank konvensional. Tujuan dari pengaturan yang ketat ini agar kepentingan para nasabah yang menempatkan dana di bank syariah terlindungi. Jika tidak terdapat kebijakan yang lebih ketat, maka bank syariah akan dapat memberikan pembiayaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak terkait dengan tingkat *return* yang lebih kecil dibandingkan dengan nasabah lain. Dengan tingkat *return* yang rendah ini maka pendapatan yang diperoleh bank akan menurun, dampaknya tingkat bagi hasil yang dibagikan akan kecil. Hal ini akan mengakibatkan kurang berkembangnya bisnis syariah secara menyeluruh. Tindakan demikian perlu pengaturan dan pengawasan yang lebih kepada bank syariah.

Dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Mekanisme seperti itu akan mencegah kemungkinan dana pembiayaan digunakan untuk transaksi spekulasi, atau jual beli

valas. Jika nasabah terjadi *default*, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada barang yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank syariah, karakter nasabah (*personal garansi*) lebih dinomorsatukan ketimbang *cover guarantee* berupa aset (Karim, 2003). Dengan demikian debitur yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapatkan prioritas. Oleh sebab itu, risiko syariah sebetulnya lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang akan dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank konvensional. (Infoperbankan.com, 2010).

Dalam perhitungan risiko pasar (*market risk*), ruang lingkup yang telah ditentukan dalam amandemen *Basel Capital Accord* (BCA) 1996 yang meliputi berbagai risiko yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko ekuitas, risiko komoditas, risiko nilai tukar dan risiko perubahan harga *option*. Berdasarkan hal tersebut, maka bisnis perbankan yang berbasis pada tingkat suku bungalah yang akan sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan instrumen keuangan yang berbasis tingkat suku bunga. Secara logika bisnis perbankan syariah yang berbasis *equity* bukan berbasis tingkat suku bunga melainkan berdasarkan bagi hasil cenderung kurang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga. Namun demikian perbankan syariah pada kenyataan masih rentan dengan pergerakan tingkat suku bunga karena dalam alokasi penempatan dana bank syariah terdapat penempatan SBI yang berbasis dengan tingkat suku bunga sehingga secara tidak langsung perbankan syariah masih memiliki keterkaitan dengan pergerakan tingkat suku bunga.

Karakteristik dari perbankan syariah dalam pembiayaan *murabahah* adalah dengan sifat *carry inventory item*. Dengan sistem ini perbankan syariah akan terkena dampak apabila terdapat kenaikan atau penurunan harga komoditi namun demikian perbankan syariah akan terbebas kenaikan atau penurunan harga komoditi yang disebabkan karena adanya spekulasi nilai harga komoditi tersebut. Selama beberapa tahun terakhir ini, pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan peningkatan tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang lebih tinggi. Pengelolaan risiko



Rasio NPF [aksis kiri] PYD {yoy} [aksis kanan] NPF [joy] i. aksis kanan]

penurunan suku bunga konvensional yang memicu adanya nasabah yang meninggalkan ataupun mengalihkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Seiring dengan meningkatnya risiko pembiayaan, agar dapat mengembangkan perbankan syariah maka manajemen harus melakukan pengelolaan dan risiko pembiayaan beserta pengukurannya. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas tertinggi perbankan Indonesia dalam melakukan pengawasan kepada perbankan syariah dengan mengukur kondisi tingkat kesehatan bank yang diindikasikan dengan rasio tingkat kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Penentuan nilai CAR sudah menjadi standar internasional dalam dunia perbankan. Nilai CAR ini digunakan untuk menentukan seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank dalam menutup risiko kerugian yang akan terjadi.

Penerapan nilai CAR minimum yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh *Basel Committee (Bank for international settlement)*. Tujuan dari penetapan nilai CAR oleh *Basel Committee* tersebut adalah untuk memastikan bahwa bank yang menjalankan usaha perbankan memiliki *capital* yang cukup untuk menyerap *Credit Risk, Market Risk* dan *Operasional Risk* yang melekat pada aktivitas operasional perbankan tersebut. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip

Syariah menyatakan bahwa tingkat kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik bagi pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Perubahan pada metodologi penilaian kondisi bank yang ditetapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

Untuk mengukur risiko pembiayaan syariah, ada dua metode *Standardized Approach* dan *Internal Model Approach*. Metode *Standardized Approach* mensyaratkan modal minimum sebesar 8% dan lebih bersifat *one size fits all*. Metode tersebut memberikan bobot yang sama terhadap risiko pembiayaan tanpa mempertimbangkan kondisi makro dan mikro perekonomian, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, limit pembiayaan dan jatuh tempo pembiayaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memperkenankan untuk membuat metode pengukuran risiko pembiayaan berupa *Internal Model Approach* agar bank dapat mengukur seberapa besar risiko pembiayaan yang akan dibentuk yang mendekati kenyataan kerugian yang terjadi selama proses pemberian pembiayaan. Perbankan dapat mengetahui dengan pasti risiko-risiko yang kemungkinan terjadi sehingga perolehan laba perusahaan semakin lebih akurat. Metode pengukuran yang dikembangkan oleh *Basel Committee* adalah *CreditRisk⁺* dari *Credit Suisse Financial Products* (CSFP), *CreditMetrics* dari JP Morgan, *Portfolio Manager* dari KMV, dan *Credit Portfolio View* dari McKinsey.

Berdasarkan pertumbuhan perbankan syariah yang cukup pesat dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana serta besarnya risiko yang harus ditanggung oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, maka dalam tesis ini dengan menggunakan studi kasus pada BNI Syariah, akan dihitung besarnya nilai risiko pembiayaan yang harus ditanggung bank syariah dalam menjalankan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dengan berdirinya BNI Syariah sebagai bank umum syariah pada tanggal 18 Juni

2010 yang terlepas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang sangat pesat tersebut, mengakibatkan berbagai kelemahan dalam manajemen perbankan syariah yang ditunjukkan pada masih rendahnya pemahaman manajemen risiko dari pengurus perbankan syariah dan belum dibentuknya satuan kerja manajemen risiko bank. Terutama dalam hal penyaluran pembiayaan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai perbankan syariah dan mampu memahami tentang pengelolaan risiko, keterbatasan informasi atas kondisi kinerja keuangan bank dan berbagai tingkat risiko yang harus disampaikan kepada *stakeholders*. Kebutuhan untuk melakukan perhitungan terhadap risiko pembiayaan sangat diperlukan oleh BNI Syariah untuk itu perlu dilakukan pengukuran tingkat risiko pembiayaan tersebut dengan pendekatan *CreditRisk⁺*.

Tesis ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar kerugian yang dapat diperkirakan (*expected loss*) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) dari portfolio pembiayaan murabahah BNI Syariah dengan *internal model approach* yang menggunakan metode *CreditRisk⁺* dengan menggunakan distribusi *Poisson*?
2. Berapa besar *economic capital* yang harus disediakan oleh BNI Syariah untuk menutup kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*)?
3. Apakah metode internal model *CreditRisk⁺* dapat diaplikasikan untuk mengukur risiko pembiayaan *murabahah* (kredit konsumtif) untuk BNI Syariah pada khususnya dan Perbankan Syariah pada umumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini akan diukur besarnya risiko pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat melalui pendekatan pengukuran risiko *CreditRisk⁺*, dimana tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen BNI Syariah dapat menghitung *probability of default* dari pemberian pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan distribusi *Poisson*.

2. BNI Syariah dapat menghitung *expected loss* dan *unexpected loss* dari sebuah portfolio pembiayaan *murabahah* (kredit konsumtif).
3. BNI Syariah dapat menghitung besarnya nilai *economic capital* yang harus disediakan oleh BNI Syariah untuk menutup kerugian yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*) sehingga manajemen BNI Syariah dapat membuat suatu keputusan yang tepat untuk dapat meminimalisasi risiko pembiayaan yang akan timbul dan keputusan yang tepat dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam perhitungan risiko pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah, ada beberapa faktor pembatas yaitu :

- a. Obyek penelitian adalah pemberian pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah dengan rentang waktu selama 3 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan menggunakan data bulanan. Pembatasan obyek penelitian selama tiga tahun dikarenakan kemudahan untuk mendapatkan data pembiayaan *murabahah* tersebut pada BNI Syariah.
- b. Metode pengukuran risiko pembiayaan yang digunakan adalah *CreditRisk⁺ Model*.
- c. Pembiayaan *murabahah* dinyatakan *default* apabila tunggakan kewajibannya melebihi 90 hari atau secara kolektibilitas tergolong sebagai kurang lancar hingga macet.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BNI Syariah, yaitu :

- a. Membantu manajemen untuk untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengelola portfolio pembiayaan *murabahah* untuk dapat mengoptimalkan serta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *default*.
- b. Hasil perhitungan *probability of default* diharapkan dapat memberikan informasi

kepada manajemen untuk mengantisipasi kenaikan *write-off account* (rekening hapus buku).

c. Memberikan masukan kepada manajemen BNI Syariah mengenai kelebihan dan kekurangan metode *CreditRisk⁺* dalam mengukur risiko pemberian pembiayaan *murabahah* sehingga dapat dijadikan acuan pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* pada bank syariah lain yang berkarakteristik sama. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan menggunakan data bulanan. Data pembiayaan *murabahah* tersebut mencakup data jumlah eksposur, jumlah debitur, kolektibilitas dan *recovery rate*. Sedangkan metode pengukuran risiko kredit yang digunakan adalah *Internal Model CreditRisk⁺*

TUGAS MANAJEMEN RESIKO



DI SUSUN

OLEH

MUHAMMAD FEBRI

NIM 192510020

UNIVERSITAS BINA DARMA

PALEMBANG

TAHUN

2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sehari-hari kita pernah mendengar kata “Resiko” dan sudah biasa dipakai dalam obrolan dari kebanyakan orang. Resiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individu maupun organisasi. Berbagai macam resiko, seperti resiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, resiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika resiko-resiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal, Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama bahwa tujuan perusahaan adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif organisasi.

Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam bisnis pada masa kini.

Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, dan walaupun mengalami kerugian sangat kecil sekali. Misalnya membeli lotere. Jika beruntung maka akan mendapat hadiah yang sangat besar, tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotere relatif kecil. Apakah ini juga tergolong resiko?

Jawabannya adalah hal ini juga tergolong resiko. Selama mengalami kerugian walau sekecil apapun hal itu dianggap resiko

Mengapa resiko harus dikelola? Jawabannya tidak sulit ditebak, yaitu karena resiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan sepatu yang mengalami kebakaran. Kerugian langsung dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat asset yang terbakar (misalnya gedung, material, sepatu setengah jadi, maupun sepatu yang siap untuk dijual). Namun juga dilihat kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut.

Resiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen resiko. Peran dari manajemen resiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. Pengertian Manajemen Resiko

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko- resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum).

Manajemen resiko yaitu bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan resiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen resiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi resiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum organisasi. Tujuan utama untuk memahami potensi upside dan downside dari semua faktor yang dapat memberikan dampak bagi organisasi. Manajemen resiko meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi.

Manajemen resiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan diprogram untuk dipimpin beberapa manajemen senior. Manajemen resiko sebagai suatu strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen resiko sebagai bagian

dari deskripsi kerja. Manajemen resiko mendukung keterbukaan, kinerja pengukuran dan bonus, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan.

Definisi manajemen resiko (risk management) di atas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata kunci sebagai berikut:

1) On going process

Manajemen resiko dilaksanakan secara terus menerus dan dimonitor secara berkala. Manajemen resiko bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali.

2) Effected by people

Manajemen resiko ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi. Untuk lingkungan instansi pemerintah, manajemen resiko dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi/departemen yang bersangkutan.

3) Applied in strategy setting

Manajemen resiko telah disusun sejak dari perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan manajemen resiko, str. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko (risk). Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja.

Secara umum resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Mengapa resiko harus dikelola? Jawabannya tidak sulit ditebak, yaitu karena resiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan sepatu yang mengalami kebakaran. Kerugian langsung dari peristiwa tersebut adalah

kerugian finansial akibat asset yang terbakar (misalnya gedung, material, sepatu setengah jadi, maupun sepatu yang siap untuk dijual). Namun juga dilihat kerugian tidak langsungnya, seperti tidak bisa beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut. Resiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen resiko. Peran dari manajemen resiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi reactive decision making dari manajemen puncak.

4) Applied across the enterprised

Strategi yang telah dipilih berdasarkan manajemen resiko diaplikasikan dalam kegiatan operasional, dan mencakup seluruh bagian/unit pada organisasi. Mengingat resiko masing-masing bagian berbeda, maka penerapan manajemen resiko berdasarkan penentuan resiko oleh masing-masing bagian.

5) Designed to identify potential events

Manajemen resiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian atau keadaan yang secara potensial menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan organisasi.

6) Provide reasonable assurance

Resiko yang dikelola dengan tepat dan wajar akan menyediakan jaminan bahwa kegiatan dan pelayanan oleh organisasi dapat berlangsung secara optimal.

7) Geared to achieve objectives

Manajemen resiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih

pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen resiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen resiko (manusia, staff, organisasi).

Dalam perkembangannya resiko-resiko yang dibahas dalam manajemen resiko dapat diklasifikasi menjadi:

1. Resiko Operasional
2. Resiko Hazard
3. Resiko Finansial
4. Resiko Strategis

Hal ini menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan manajemen resiko terintegrasi korporasi (enterprise risk management).

Manajemen resiko dimulai dari proses:

- a. identifikasi resiko
- b. menganalisa resiko
- c. monitoring resiko

- a. Identifikasi resiko

Proses ini meliputi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi resiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi resiko adalah mendaftar resiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi resiko antara lain:

- a) Brainstorming
- b) Survey
- c) Wawancara
- d) Informasi historis
- e) Kelompok kerja

b. Menganalisa resiko

Setelah melakukan identifikasi resiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran resiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa resiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen resiko.

c. Monitoring resiko

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu resiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen resiko tidaklah berhenti sampai di sini saja. Praktek, pengalaman, dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu resiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi resiko dan pengukuran resiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya resiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu resiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

BAB 3

PEMBAHASAN

Kasus Manajemen Asset Berbasis Resiko pada Perusahaan Air Minum Air bersih atau air minum sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Den Haag, Belanda tahun 2000, memproyeksik diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya, belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih, baik secara kuantitas maupun kualitas, konflik perebutan air baku yang melintasi dua atau lebih pemerintah daerah, adanya daerah yang tidak menyediakan pengaturan air baku, adanya penggundulan hutan di kawasan daerah aliran sungai, kesulitan keuangan, terbelit hutang yang cukup besar dan tidak mampu membayar hutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak sedikit dari perusahaan air minum yang ada, jika ditinjau dari posisi keuangan perusahaan sudah dalam keadaan pailit mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan asset utama perusahaan air minum.

Bagi perusahaan air minum, infrastruktur air minum merupakan asset utama yang nilainya signifikan. Oleh karena itu, harus dikelola secara baik mulai sejak perencanaan kebutuhan, penyediaan dana, pengadaan asset, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pada pemusnahan asset.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, manajemen asset merupakan asset merupakan suatu proses untuk menghasilkan nilai maksimal bagi semua stakeholder perusahaan dari pengelolaan asset fisik yang dimiliki perusahaan, baik untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan umum, dengan menyeimbangkan kinerja operasional dari asset dengan biaya siklus hidup dan profil resikonya. Manajemen berbasis resiko lebih menekankan pada proses mengelola asset fisik yang sangat besar dan berhubungan dengan resiko-resiko yang melekat pada proses tersebut

dengan melibatkan penerapan proses manajemen resiko terhadap asset utama perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebab utama kegagalan pencapaian sasaran perusahaan. Penerapan proses manajemen resiko dapat dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan air minum atau secara khusus lebih menekankan pada aktivitas manajemen asset perusahaan (setiap aktivitas lifecycle asset management). Tujuan dari diterapkannya proses manajemen resiko adalah tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan kesinambungan aktivitas bisnis inti dan jasa yang penting, tetapi juga memenuhi kewajiban hukum; menjaga kesehatan pekerja dan masyarakat; perlindungan lingkungan; beroperasinya dan perlindungan asset pada biaya rendah; dan rencana kontijensi untuk situasi darurat bila terjadi rencana alam.

Proses manajemen resiko meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi resiko

Resiko merupakan peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Seluruh resiko yang mungkin terjadi dan berdampak negative bagi perusahaan secara signifikan harus terlebih dahulu diidentifikasi. Pada perusahaan air minum resiko yang mungkin terjadi adalah:

Ketidakterediaan air di sumber air dapat terjadi karena kegagalan pada struktur sumber air, kekeliruan dalam memperkirakan hasil/kapasitas penyimpanan, kualitas sumber air yang tidak memenuhi syarat, dan kegiatan operasional yang tidak tepat.

Kehilangan air yang sebenarnya dapat terjadi karena adanya penguapan air di tempat penyimpanan dan kebocoran seperti kebocoran pada pipa jaringan distribusi, dan tempat penyimpanan air.

Kehilangan air yang jelas terlihat dapat terjadi karena adanya pengukuran meteran yang tidak akurat seperti alat kalibrasi meteran yang tidak akurat, alat meteran yang sudah tua, alat meteran yang berputar rendah, dan adanya pemakaian air yang tidak terukur dengan meteran seperti pemakaian yang tidak

dibenarkan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena pembuangan air limbah yang tidak terkendali dari kegiatan pemeliharaan atau kegagalan jaringan pipa.

Terganggunya keselamatan dan kesehatan masyarakat pengguna air minum dapat terjadi karena kerusakan peralatan dan tercemarnya sumber air minum/produksi air minum selama pembangunan, pemeliharaan, atau pengoperasian infrastruktur penyedia air. Kenaikan harga asset infrastruktur penyedia air dapat terjadi karena kenaikan tingkat inflasi, kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman dapat terjadi karena kondisi perekonomian nasional yang tidak baik.

2. Menganalisis Resiko

Setelah seluruh resiko diidentifikasi, maka dilakukan pengukuran tingkat kemungkinan dan dampak resiko. Pengukuran resiko dilakukan setelah mempertimbangkan pengendalian resiko yang ada. Pengukuran resiko dilakukan menggunakan criteria pengukuran resiko secara kualitatif, semi kualitatif, atau kuantitatif tergantung pada ketersediaan data tingkat kejadian peristiwa dan dampak kerugian yang ditimbulkannya.

3. Mengevaluasi Resiko

Setelah resiko diukur tingkat kemungkinan dan dampaknya, maka disusunlah urutan prioritas resiko. Mulai dari resiko dengan tingkat resiko tertinggi, sampai dengan resiko terendah. Resiko yang tidak termasuk dalam resiko yang dapat diterima/ditoleransi merupakan resiko yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Setelah diketahui besarnya tingkat resiko dan prioritas resiko, maka perlu disusun peta resiko.

4. Menangani Resiko

Resiko yang tidak dapat diterima/ditoleransi segera dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir kemungkinan dampak terjadinya resiko dan personel yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan rencana tindakan. Cara menangani resiko berupa memindahkan resiko melalui asuransi dan kontrak kerja kepada pihak ketiga, mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya resiko dengan cara menambah/meningkatkan kecukupan pengendalian internal yang ada pada proses bisnis perusahaan, dan mengeksploitasi resiko bila tingkat resiko dinilai lebih rendah dibandingkan dengan peluang terjadinya peristiwa yang akan terjadi. Pemilihan cara menangani resiko dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan rencana tindakan lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh dari pengurangan dampak kerugian resiko. Seluruh resiko yang diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani dimasukkan ke dalam register resiko yang memuat informasi mengenai nama resiko, uraian mengenai indikator resiko, faktor pencetus terjadinya peristiwa yang merugikan, dampak kerugian bila resiko terjadi, pengendalian resiko yang ada, ukuran tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada, dan rencana tindakan untuk meminimalisir tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko, serta personil yang bertanggung jawab melakukannya.

5. Memantau Resiko

Perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan menimbulkan resiko baru bagi perusahaan, mengubah tingkat kemungkinan/dampak terjadinya resiko, dan cara penanganan resikonya. Sehingga setiap resiko yang teridentifikasi masuk dalam register resiko dan peta resiko perlu dipantau perubahannya.

6. Mengkomunikasikan Resiko

Setiap tahapan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan resiko dikomunikasikan/dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan manajemen resiko

dapat tercapai sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan berasal dari internal perusahaan (manajemen, karyawan) dan eksternal perusahaan (pemasok, pemerintah daerah/pusat, masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, dan konsumen air bersih).

Walaupun penerapan proses manajemen resiko pada perusahaan air minum di Indonesia khususnya perusahaan daerah air minum belum ada peraturan hukumnya, namun karena manajemen resiko merupakan praktik terbaik (best practice), maka seharusnya sudah mulai diterapkan secara sistematis, terintegrasi, dan melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan air minum, khususnya pada aktivitas manajemen asset.

Agar manajemen resiko dapat diterapkan dengan baik, maka perlu disiapkan segala infrastruktur manajemen resiko antara lain: pedoman manajemen resiko (kebijakan, pedoman umum, prosedur, dan formulir), struktur organisasi manajemen resiko (tugas, wewenang, tanggung jawab personil untuk melaksanakan manajemen resiko), dan sistem informasi pelaporan/pemantauan pelaksanaan manajemen resiko.

BAB 4

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Manajemen asset merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang tidak terlepas dari resiko. Manajemen asset berbasis resiko lebih menekankan pada proses mengelola asset fisik yang sangat besar dan berhubungan dengan resiko yang melekat pada proses tersebut dengan melibatkan penerapan proses manajemen resiko terhadap asset utama perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola penyebab utama kegagalan pencapaian sasaran perusahaan.
2. Penerapan proses manajemen resiko dapat dilakukan pada seluruh aktivitas bisnis perusahaan air minum atau secara khusus lebih menekankan pada aktivitas manajemen asset perusahaan (setiap aktivitas lifecycle asset management). Walaupun penerapan manajemen resiko pada perusahaan air minum di Indonesia khususnya perusahaan daerah air minum belum ada peraturan hukumnya, namun karena manajemen resiko merupakan praktik terbaik (best practice) maka seyogyanya sudah mulai dapat diterapkan secara sistematis, terintegrasi, dan melekat pada setiap aktivitas bisnis perusahaan air minum, khususnya pada aktivitas manajemen asset sehingga tujuan manajemen asset dapat tercapai.
3. Manajemen asset berbasis resiko kiranya dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka memaksimalkan pengelolaan asset perusahaan air minum.

DAFTAR PUSTAKA

<http://wikipedia.org>

<http://ahds.ac.uk>

<http://jiscinfonet.ac.uk/infokits/risk-management>

<http://vibiznews.com>

Artikel “Lifecycle Asset Management” Website Manajemen Asset, 2007.

Artikel “Risk Based Enterprise Asset Management”, Capgemini, Website 2007.

Artikel “Sumber Daya Air”, Website Bappenas.

Artikel “Sumbang Pikir dalam PDAM Rescue”, Kepala Bidang Rencana dan Evaluasi Pusat Pengembangan Investasi BAPEKIN, Website 2007.

Artikel “Water Infrastructure”, Website GAO, Maret 2004.

Slide “Pengantar Pengelolaan Asset (Infrastruktur)”, Gary Mc Lay, Website, 2 Juni 2006.

Chapman, Christy. Bringing ERM into Focus. Internal Auditor, June 2003
Committee of Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. What is COSO: Background and Events Leading to Internal Control-Integrated Framework. 1992

Simmons, Mark. COSO Based Auditing. The Internal Auditor, December 1997 The Institute of Internal Auditors. Internal C

**TEKNIK-TEKNIK MANAJEMEN RISIKO PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN ILIR**



MAKALAH

Oleh

SRI KOMALASARI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

192510018

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN-S2
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan pembuatan Makalah ini dengan judul “Teknik-Teknik Manajemen Risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir” .

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Risiko, semoga makalah ini bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya para mahasiswa Universitas Bina Darma.

Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik serta anjuran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan kepada pihak yang sudah menolong turut dan dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktunya kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, November 2020

Penulis

Sri Komalasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER LUAR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN	9
A. Pengertian Manajemen Risiko	9
B. Manfaat Manajemen Risiko.....	12
C. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	13
D. Tipe-tipe Risiko.....	14
BAB III PEMBAHASAN	19
A. Teknik-teknik yang dapat menjadi alternatif dalam mengelolah risiko... ..	20
B. Keputusan memilih alternatif risiko	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi setiap organisasi atau perusahaan yang berbentuk swasta atau pemerintah swasta maupun pemerintah, tentunya memiliki tujuan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilakukannya. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai maka diperlukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Istilah sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang ada dalam organisasi yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan organisasinya (Schein dalam Mangkunegara,2008:23).

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki suatu organisasi, salah satu implikasinya adalah bahwa investasi terpenting yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah di bidang sumber daya manusia (Handoko,2003:4). Oleh karena itu, agar sebuah organisasi dapat mencapai kinerja yang maksimal diperlukan perlakuan yang adil dan memuaskan pada sumber daya manusia yang bekerja pada organisasi tersebut. Setiap organisasi dituntut mampu berkompetisi agar dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Strategi untuk selalu dapat berkompetisi adalah dengan cara memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki (Sudarmanto,2009:1). Akan tetapi masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen karena keberhasilan manajemen tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia dalam perusahaan dapat berjalan efektif maka perusahaan pun tetap berjalan efektif, dengan kata lain kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari kinerja karyawan. Maka selaras dengan yang dikemukakan Handoko (2003:223) bahwa sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia

yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi.

Pada suatu organisasi atau perusahaan, kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting. DuBrin (2005:3) mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat tercapai.

Kendala dan ketidak pastian akibat dari kegiatan sebuah organisasi biasa kita kenal sebagai risiko. Setiap orang sangat familiar terhadap risiko. Dalam perilaku sehari-hari setiap orang memahami akan datangnya suatu risiko akibat dari perkataan, perbuatan atau keadaan. Perubahan tersebut membuat organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasarannya menghadapi banyak tantangan, kendala atau hambatan, baik kecil maupun besar, bahkan dapat menjadi ancaman atau peluang. Misalnya tindakan seseorang mengikuti asuransi kesehatan. Hal ini mencerminkan pengelolaan risiko menghadapi akan biaya pengobatan saat datang sakit tak terduga. Pepatah yang sangat populer seperti 'sedia payung sebelum hujan' menggambarkan bagaimana orang memahami risiko terjadinya hujan dan mengelola risiko tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Menurut Soemarno pengertian risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan risiko menurut Hanafi, adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sehingga risiko dapat diartikan sebagai dampak negatif atas pencapaian tujuan. Terjadinya dampak negatif tersebut disebabkan dari keadaan yang tidak pasti, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak

dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Sebelum terjadi krisis pandemi covid-19, dunia kerja berjalan secara normal. Para pemimpin dapat melaksanakan pola kepemimpinannya secara normal dan standar. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin, ada beberapa hal yang semestinya dipersiapkan dalam rangka antisipasi, antara lain, menyiapkan kebutuhan dasar, membuat perencanaan dan melakukan pemetaan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, serta mengantisipasi dampak yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Di masa terjadinya pandemi Covid-19 sekarang ini, kepemimpinan atasan dan motivasi karyawan atau pegawai merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja karyawan ataupun pegawai. Covid-19 adalah nama resmi dari coronavirus (*Coronavirus Disease 2019*, yang disingkat *Covid-19*). Corona virus adalah jenis virus yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru berat hingga kematian. Penyakit ini dapat menular antar manusia dan dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi (Alodokter, 2020).

Covid-19 tidak hanya berakibat buruk pada bidang kesehatan, tetapi berakibat buruk juga bidang perekonomian negara. Pegawai bekerja dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Lingkungan kerja, suasana dan pola pekerjaan yang berbeda. Salah satu perbedaan yang mencolok ditengah pandemi Covid-19 ini adalah bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Biasanya pegawai mengerjakan seluruh pekerjaan di kantor, tetapi di masa pandemi Covid-19

sekarang ini pegawai dituntut bekerja di rumah, dalam rangka untuk mencegah penularan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2020 Nomor : 440/2436/SJ tentang Pencegahan *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Hingga kini pandemi Covid-19 telah menyerang hampir seluruh sendi kehidupan manusia, terutama dari bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Hampir semua negara mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dalam konteks penanggulangan krisis, maka faktor kepemimpinan memegang peranan penting dan sangat krusial. Pola kepemimpinan dan kualitas pemimpin yang baik sangat diperlukan sebelum, ketika dan setelah terjadi krisis. Termasuk kepemimpinan yang ada di lingkungan pemerintahan, salah satunya adalah kepemimpinan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Ogan Ilir merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Ogan Ilir memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Ogan Ilir merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan serta menyiapkan Sumber Daya Manusia sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Salah satu tantangan yang cukup berat yang sering harus dihadapi adalah bagaimana teknik-teknik risiko mampu menahan dampak yang akan terjadi dalam terutama di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir. Pegawai merupakan sumber daya yang menentukan keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuannya. Sedangkan kinerja Pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja pegawai meliputi kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam

bekerja. Berdasarkan berbagai uraian dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Teknik-Teknik Manajemen Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimanakah teknik-teknik yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengelolah atau menghadapi suatu risiko yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimanakah menentukan keputusan dalam memilih teknik alternatif mengelolah risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui teknik-teknik yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengelolah atau menghadapi suatu risiko yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Untuk menentukan keputusan dalam memilih teknik alternatif mengelolah risiko di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir?

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu hal tertentu. Sementara itu, risiko adalah akibat yang tidak menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, manajemen risiko adalah suatu metodologi untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi.

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas.

Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini.

1. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kesempatan dari kerugian).

Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka "*chance*" sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

2. *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah "*possibility*" berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antar nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi definisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

3. *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian)

Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (uncertainty) yaitu adanya risiko, karena adanya ketidakpastian.

Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha Bank. Pengertian manajemen risiko dapat juga ditemukan menurut pendapat beberapa ahli, antara lain:

1. **Williams A. Numan**

Manajemen risiko adalah suatu usaha secara rasional untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau cedera.

2. **Ferry N. Idroes**

Manajemen risiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematis dalam indentifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

3. **Herman Darmawi**

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Maka dari itu perlu diketahui makna cakupan yang lebih tinggi untuk memahami proses manajemen risiko.

4. **Menurut Smith, 1990**

Manajemen Resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan

dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

5. **Menurut Clough and Sears, 1994,**

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.

6. **Menurut William, et.al.,1995,p.27**

Manajemen risiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi.

7. **Dorfman, 1998, p. 9**

Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.

Tindakan manajemen resiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam resiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen resiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil (**Shen, 1997**). Manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi resiko (**Uher,1996**).

Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 stage utama, yaitu (**Soeharto, 1999**):

1. Identifikasi resiko
2. Analisa dan evaluasi resiko
3. Respon atau reaksi untuk menanggulangi resiko tersebut

B. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain

1. Menurut Mok (et al., 1996)

Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit.

- a. Memudahkan estimasi biaya.
- b. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar.
- c. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
- d. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
- e. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.
- f. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
- g. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.

2. Menurut Darmawi, (2005, p. 11)

Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

- a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
- b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
- c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
- d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.
- e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*.

Manfaat manajemen risiko dalam perusahaan sangat jelas, maka secara implisit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko antara lain sebagai berikut ini (**Darmawi, 2005, p. 13**):

- a. Survival
- b. Kedamaian pikiran
- c. Memperkecil biaya
- d. Menstabilkan pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
- f. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan
- g. Merumuskan tanggung jawab social perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

C. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius dan konsisten agar hal tersebut dapat diatasi bahkan hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan manajemen risiko yang merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko memiliki fungsi, antara lain:

1. Menemukan risiko potensial
2. Mengevaluasi risiko potensial
3. Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.

Dengan demikian manajemen risiko berfungsi dalam menemukan risiko potensial, mengevaluasi risiko potensial, dan menanggulangi kerugian yang ditimbulkan oleh produk usaha atau aktivitas yang dilakukan perusahaan atau badan usaha. Manajemen risiko pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Di sisi lain,

manajemen risiko yang meliputi peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Dengan memperoleh dan efisiensi yang tinggi tentu akan mendukung pencapaian tujuan bank yang bersangkutan dan pada gilirannya akan meningkatkan outcome yang diharapkan.

D. Tipe-Tipe Risiko

Risiko dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Risiko murni (*pure risk*) adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh : kecelakaan, kebakaran, banjir dsb. Salah satu cara menghindari risiko murni ini adalah dengan asuransi. Dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalkan. Itu sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risk*).
2. Risiko spekulatif adalah suatu risiko yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Contoh: usaha bisnis, membeli saham. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko bisnis.

Berikut ini beberapa teknik-teknik yang dapat menjadi alternative dalam mengelola suatu risiko:

1. PENGHINDARAN RISIKO (*RISK AVOIDANCE*)

Alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya risiko melanggar peraturan pengelolaan bank yang dapat dilakukan dengan mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang terkait dengan pengelolaan bank atau risiko adanya penuntutan (komplain) dari konsumen terhadap produk bank yang dihasilkan

dapat dihindari dengan mencantumkan spesifikasi produk-produk perbankan yang jelas dan rinci kepada nasabah.

Namun untuk risiko murni (Pure Risk) dengan kemungkinan terjadinya rendah serta sukar diprediksi teknik penghindaran tidak dapat digunakan. Bank secara sengaja melakukan aktivitas bisnis perbankan untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan bisnis tersebut, bank menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Karena itu, risiko semacam itu tidak bisa dihindari.

2. PENANGGUNGGAN ATAU PENAHANAN RISIKO (*RISK RETENTION*)

Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan/bank menanggung sendiri risiko yang muncul (menahan risiko tersebut atau *risk retention*). Pada suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu bank berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang terjadi. Namun demikian, bank tetap berupaya agar risiko itu tidak terealisasi/terjadi atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi. Berikut ini beberapa bentuk risiko dan kondisi sehingga bank berani menanggung risiko yang mungkin terjadi.

Penahanan Yang direncanakan dan yang Tidak Direncanakan

1. Yang dimaksud dengan penahanan risiko direncanakan adalah dimulai dari upaya untuk mengetahui seluruh risiko yang mungkin timbul, atau mengidentifikasi risiko yang ada kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Pada kondisi ini tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab bank sendiri dan tidak dialihkan pada pihak lain atau pihak ketiga diluar bank.
2. Sedangkan penahanan risiko tidak direncanakan adalah merupakan bentuk kegagalan bank dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sehingga pada saat risiko itu terjadi bank tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki tindakan yang telah terencana dalam mengatasinya.

Pendanaan Risiko yang Ditahan

Seperti tersebut diatas, dalam menerapkan risk retention (menahan risiko) bank tetap membutuhkan anggaran walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan harus melakukan risk transfer. Pendanaan bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti menyisihkan dana cadangan, *Self-insurance*, dan *captive insures*.

a. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan pengalokasian atau penyesihan dana tertentu yang didapat dari keuntungan bank atau yang lain secara periodik dengan tujuan untuk pembiayaan kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya saja sebesar 1 % dari laba ditahan dialokasikan untuk pengelolaan risiko

b. *Self-insurance*

Pengelolaan dana cadangan bisa ditingkatkan lagi menjadi semacam asuransi untuk internal perusahaan sendiri (*self-insurance*). Meskipun ada keberatan disini tidak mengindikasikan adanya transfer risiko ke pihak luar. Risiko masih berada di perusahaan. Dengan *self-insurance*, perhitungan dilakukan lebih teliti untuk menentukan berapa besarnya premi yang harus disisihkan, berapa besarnya tanggungan yang bisa diberikan.

c. *Captive-insurance*

dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari suatu bank.

3. PENGALIHAN RISIKO (*RISK TRANSFER*)

Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain (mentransfer risiko ke pihak lain). Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara :

a. **Asuransi**

Asuransi merupakan metode transfer risiko yang paling umum, khususnya untuk risiko murni (*pure risk*). Asuransi adalah kontak perjanjian antara yang diasuransikan (*insured*) dan perusahaan asuransi (*insurer*), di mana *insurer* bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi (*insurer*) memperoleh premi asuransi sebagai balasannya.

Empat hal diperlukan dalam transaksi asuransi :

1. Perjanjian kontrak
2. Pembayaran premi
3. Tanggungan (*benefit*) yang dibayarkan jika terjadi kerugian seperti yang disebutkan dalam kontrak
4. Penggabungan (*pool*) sumber daya oleh perusahaan asuransi yang diperlukan untuk membayar tanggungan.

b. **Hedging**

Hedging atau lindung nilai merupakan salah satu bentuk risk transfer dengan melibatkan pihak lain sebagai penanggung jawab bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Hedging biasanya terkait dengan perlindungan terhadap kewajiban membayar atau kebutuhan akan uang asing. Misalnya kewajiban untuk dapat membayar hutang dalam dolar atau dalam mata uang asing lainnya. Perubahan kurs mata uang asing terhadap rupiah misalnya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar misalnya saja waktu kejadian kerusuhan Mei 1998 yang mendorong dollar terapresiasi terhadap rupiah yang mencapai 500%. Pada kondisi ini perusahaan yang melakukan hedging dengan kepemilikan atau opsi membeli dollar dimasa depan akan sangat tertolong mengingat sesuai dengan perjanjian forward atau future yang bersangkutan tidak harus membeli pada kurs yang akan datang tetapi berdasarkan kesepakatan yang berlaku dalam kontrak. Untuk kondisi seperti ini hedging sangat mirip dengan asuransi.

c. **Incorporated**

Incorporated atau membentuk perseroan terbatas merupakan alternatif transfer risiko, karena kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas

hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kewajiban tersebut tidak akan sampai ke kekayaan pribadi. Secara efektif, sebagian risiko perusahaan ditransfer ke pihak lain, dalam hal ini biasanya kreditur (pemegang hutang). Jika perusahaan bangkrut, maka pemegang saham dan pemegang hutang akan menanggung risiko bersama, meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Pemegang hutang biasanya mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham. Misalkan perusahaan bangkrut, asetnya dijual, hasil penjualan aset tersebut akan diberikan ke pemegang hutang. Jika masih ada sisa, pemegang saham baru bisa memperoleh bagiannya.

BAB III

PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir beralamat di Jalan Lintas Timur KM. 35 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan memiliki 28 (dua puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara dan 156 (seratus lima puluh enam) orang Pegawai Honorer, terdiri dari beberapa bidang yaitu Bagian Sekretariat, bidang Perencanaan dan Program, bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai (LLAS), UPTD Perparkiran dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), kesemua itu menjadi satu kesatuan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dengan di kepalai seorang Kepala Dinas.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini bukan saja kesehatan yang menjadi ancaman bagi Pemerintah tetapi Perekonomian yang sangat mendasar kita alami terutama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir kegiatan yang rutin dilakukan menjadi menggunakan system *Work From Home (WFH)* hal ini dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 hal ini menjadi penghambat kegiatan di kantor, walaupun menggunakan system *Work From Home (WFH)* tetapi roda kegiatan harus tetap berjalan dengan baik. Pandemi Covid-19 ini berdampak bagi system kegiatan di Dinas Perhubungan karena alokasi anggaran yang ada digunakan untuk Piket Posko Covid-19 dengan system piket dan sesuai dengan protocol kesehatan yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak.

Sebelum terjadi krisis pandemi covid-19, dunia kerja berjalan secara normal. Para pemimpin dapat melaksanakan pola kepemimpinannya secara normal dan standar. Dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin, ada beberapa hal yang semestinya dipersiapkan dalam rangka antisipasi, antara lain, menyiapkan kebutuhan dasar, membuat perencanaan dan melakukan pemetaan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, serta mengantisipasi

dampak yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Di masa terjadinya pandemi Covid-19 sekarang ini, kepemimpinan atasan dan motivasi karyawan atau pegawai merupakan dua faktor yang sangat penting dalam menggerakkan kinerja karyawan ataupun pegawai. Covid-19 adalah nama resmi dari coronavirus (*Coronavirus Disease 2019*, yang disingkat *Covid-19*). Corona virus adalah jenis virus yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru berat hingga kematian. Penyakit ini dapat menular antar manusia dan dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi (Alodokter, 2020).

Hal ini yang menjadi peristiwa yang dapat mempengaruhi risiko dan dapat mempengaruhi serta memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori risiko lainnya. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir harus dengan benar-benar menentukan Teknik-teknik/Strategi yang tepat dalam menghadapi setiap resiko yang ada.

A. Teknik-teknik yang dapat menjadi alternatif dalam mengelola suatu risiko:

1. PENGHINDARAN RISIKO (*RISK AVOIDANCE*)

Alternatif penghindaran risiko pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Misalnya melakukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, dengan meminimalisir anggaran karena anggaran yang ada telah direalisasikan untuk kegiatan Piket Posko Covid-19 di kabupaten Ogan Ilir, meskipun bekerjasama dengan dinas lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Kesatuan Polisi Pamong Praja (POL PP) hal ini yang dapat membantu kelancaran dalam kegiatan tersebut.

2. PENANGGUNGGAN ATAU PENAHANAN RISIKO (*RISK RETENTION*)

Alternatif lain dari manajemen risiko adalah Dinas Perhubungan menanggung sendiri risiko yang muncul (menahan risiko tersebut atau *risk retention*). Pada suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu dinas berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang terjadi. Namun demikian, dinas tetap berupaya agar risiko itu tidak terealisasi/terjadi atau juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi terburuk terjadi. Berikut ini beberapa bentuk risiko dan kondisi sehingga bank berani menanggung risiko yang mungkin terjadi.

Penahanan Yang direncanakan dan yang Tidak Direncanakan

1. Yang dimaksud dengan penahanan risiko direncanakan adalah dimulai dari upaya untuk mengetahui seluruh risiko yang mungkin timbul, atau mengidentifikasi risiko yang ada kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Pada kondisi ini tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab dinas sendiri.
2. Sedangkan penahanan risiko tidak direncanakan adalah merupakan bentuk kegagalan dinas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi sehingga pada saat risiko itu terjadi dinas tidak memiliki anggaran atau tidak memiliki tindakan yang telah terencana dalam mengatasinya.

Pendanaan Risiko yang Ditahan

Dalam menerapkan *risk retention* (menahan risiko) dinas tetap membutuhkan anggaran walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan harus melakukan risk transfer. Pendanaan bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti menyisihkan dana cadangan yaitu dengan cara melakukan pengalokasian atau penyisihan dana tertentu yang didapat dari saving kegiatan sebelumnya.

3. PENGALIHAN RISIKO (*RISK TRANSFER*)

Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain (mentransfer risiko ke pihak lain). Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan melalui beberapa cara :

a. Asuransi

Asuransi merupakan metode transfer risiko yang paling umum, khususnya untuk risiko murni (*pure risk*). Asuransi adalah kontak perjanjian antara yang diasuransikan (*insured*) dan perusahaan asuransi (*insurer*), di mana *insurer* bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan, dan pihak pengasuransi (*insurer*) memperoleh premi asuransi sebagai balasannya.

B. Keputusan memilih alternatif Manajemen Risiko

Alternatif manajemen risiko :

Frekuensi (probabilitas)	Severity (keseriusan)	Teknik yang dipilih
Rendah	Rendah	Ditahan
Tinggi	Rendah	Ditahan
Rendah	Tinggi	Ditransfer
Tinggi	Tinggi	Dihindari

Secara umum jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity (keseriusan) yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity tinggi, maka dinas bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut karena kondisi pandemi ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit berkurang, oleh karena itu berbagai cara yang dilakukan agar tidak terjadi keterpurukan dalam kegiatan administrasi perkantoran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam risiko. Beberapa teknik-teknik yang dapat menjadi alternatif dalam mengelola suatu risiko pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir yaitu dengan alternatif penghindaran risiko, dapat dilakukan pada tahap perencanaan dimana kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Alternatif lain adalah Dinas menanggung sendiri risiko yang muncul (menahan risiko tersebut atau *risk retention*), pada suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu Dinas berani menanggung berbagai kemungkinan risiko yang terjadi. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain (mentransfer risiko ke pihak lain) dengan cara Asuransi. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendiversifikasikan risiko lebih baik.

Secara umum jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity (keseriusan) yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity tinggi, maka bank bisa berpikir untuk menghindari risiko tersebut. Semoga Pandemi Covid-19 ini bisa cepat berakhir sehingga terpurukan ini dapat terhindari dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berjalan dengan baik.

B. SARAN

Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian

bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Walaupun demikian Dinas harus berusaha agar ketidakpastian itu harus diperkecil atau harus mengantisipasi segala kemungkinan itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Dengan kata lain, risiko harus dimanajementi dengan sebaik mungkin, agar efektifitas bank tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji.2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dubrin, Andrew J. 2005.*Leadership (terjemahan)*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- _____.2001. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE
- Mangkunegara, Anwar P 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompensasi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Virus Corona: Gejala dan penyebabnya. Diakses 12 September 2020 dari <http://www.alodokter.com>

Nama : Yose Rizal
NIM : 192510022
Mata Kuliah : Manajemen Risiko
Dosen Pengajar : Dr. Fitriasuri, S.E, Ak, M.M
Kelas : Reguler A / 34 / MM
Paper : Ujian Akhir Semester (UAS)

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap pekerjaan yang dilakukan atau digeluti oleh seseorang apapun itu selalu mengandung resiko. Resiko sangat akrab dengan pekerjaan dan bisa saja terjadi kapanpun. Resiko yang terjadi bisa kecil ataupun sangat besar dampaknya. Jika resiko itu terjadi pada seseorang maka orang itu akan mengalami kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan.

Sebagai salah satu bidang pekerjaan yang beresiko adalah menjadi Polisi, Polisi adalah salah satu pekerjaan yang sangat akrab dengan resiko hal ini sesuai dengan tugas pokoknya. Sebagaimana amanat tugas yang diemban anggota Polri tercantum dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, dan wewenang, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)
Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas di bidang Preventif
Segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
3. Tugas di bidang Refresif
Dibidang ini terdapat 2 (dua) jenis peran dan fungsi Kepolisian, yaitu refresif justisil dan non justisil. Tindakan refresif non justisil terkait dengan Pasal 18 ayat 1 (1), yaitu wewenang “ deskresi kepolisian yang umumnya membahas masalah ringan. Untuk tugas refresif justisial adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi kejahatan.

Pada dasarnya setiap anggota Polri mengemban ketiga tugas tersebut namun dalam menejemen organisasi, ketiga tugas tersebut diaplikasikan dalam beberapa fungsi dengan job discription masing-masing. Salah satunya fungsi Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang membidangi fungsi Tugas Refresif.

Fungsi Reskrim adalah bertugas menanggulangi / melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual) di masyarakat. Kriminalitas yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan oleh individu, kelompok ataupun komunitas yang merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial

dalam masyarakat. Mereka-mereka yang dihadapi oleh anggota Polri yang bertugas di Fungsi Reskrim.

Bersentuhan dengan para-pelanggar hukum tentunya sangat beresiko apalagi harus mengatasi, mengendalikan dan menindaknya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang pelanggar hukum atau pelaku kejahatan yang senang atau mau ditindak sesuai perbuatannya bahkan mereka cenderung melakukan hal apapun untuk tidak terjerat atau bebas dari masalah hukum yang telah mereka lakukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerawanan bagi anggota reskrim yang bertugas menegakkan hukum.

Ada beberapa contoh tindakan kriminalitas yang oleh dilakukan pelaku kejahatan dimasyarakat yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari beserta beberapa dampaknya yang harus dihadapi oleh anggota reskrim, antara lain :

1. Kekerasan seksual terhadap anak usia dini, yang berdampak pada adanya penyimpangan maupun kekerasan seksual tidak dapat dihindari.
2. Praktek Prostitusi Online, yang berdampak pada kriminalitas prostitusi online yang semakin meningkat.
3. Pembegalan motor, yang menyebabkan hadirnya perasaan tidak aman saat berpergian terutama ditempat-tempat sepi.
4. Perampokan, yang berdampak rasa was memiliki harta benda.
5. Tawuran, yang berdampak pada perpecahan dalam masyarakat.
6. Premanisme, yang berdampak pada keresahan dan kecemasan atas keselamatan pribadi.

Dari contoh kriminalitas tersebut, anggota reskrim harus berhadapan dengan pelaku-pelaku kejahatan dengan karakter dan perilaku yang kompleks, antara lain :

1. Berhadapan dengan pelaku yang biasanya mengalami masalah kejiwaan (pedofil atau psikopat).
2. Berhadapan dengan orang-orang yang asusila.
3. Berhadapan dengan pelaku yang berkarakter nekat.
4. Berhadapan dengan pelaku yang bersenjata dan siap melawan petugas
5. Berhadapan dengan kelompok masyarakat yang anarkis
6. Beskrim berhadapan dengan orang2 kasar dan kejam, dll

Resiko yang dihadapi oleh anggota reskrim karena berhadapan dengan pelaku-pelaku kejahatan dari berbagai kasus kejahatan tersebut dapat disimpulkan sangat tinggi, hal ini terbukti dari beberapa contoh kasus resiko yang didapat anggota reskrim saat bertugas menangkap pelaku kejahatan, antara lain :

1. Mengalami kecelakaan saat mengejar pelaku kejahatan, sehingga mengalami luka-luka, cacat fisik bahkan meninggal dunia sementara kendaraan yang digunakan mengalami kerusakan ringan sampai hancur/berat.
2. Mengalami Penganiayaan saat menangkap pelaku kejahatan, sehingga mengalami luka-luka, cacat fisik bahkan meninggal dunia.

3. Mengalami Luka Tusuk atau Bacok dan Tertembak sehingga mengalami luka-luka, cacat fisik bahkan meninggal dunia.
4. Ancaman keselamatan keluarga, beberapa pelaku kejahatan melakukan intimidasi terhadap keluarga anggota reskrim untuk menghindari dihukum atau membalas dendam.

Menurut Jendral Saut Usman Nasution (2012) menyatakan anggota kepolisian sejak awal sudah mengetahui pekerjaannya memiliki resiko termasuk kematian. Ketika bertugas seorang anggota Polri ibarat berada dipinggir liang kubur, sehingga kematian merupakan resiko yang sudah disadari.

Tentunya masih banyak lagi yang lainnya yang menjadi resiko. Walau secara natural manusia akan mengantisipasi atau mengelola resiko namun setiap anggota Polri khususnya difungsi reskrim dididik dan dilatih untuk dapat mengenali, mengantisipasi, dan mengatasi ketika resiko tersebut terjadi pada saat pelaksanaan tugas dengan menekan dampaknya seminim mungkin.

Dengan resiko yang bakal dihadapi tersebut, anggota polri dalam hal ini Fungsi Reskrim tetap dituntut dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala aktivitas yang tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama, sosial dan hukum serta merugikan secara psikologis maupun ekonomis (Kartono). Untuk pelakunya disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok atau teroris. Untuk yang terakhir, teroris agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

Sebab terjadinya kriminalitas, menurut Separovic (Weda, 1966:76) menyatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu :

(1) Faktor Personal

Termasuk didalamnya faktor biologis (umur, Jenis Kelamin, Keadaan Mental dan lain-lain) dan Psikologis (Agresivitas, Kecerobohan, dan keterasingan).

(2) Perbedaan Situasional

Seperti situasi konflik, tempat dan waktu

Dampak dari terjadinya kriminalitas, antara lain :

- Merugikan pihak lain baik material maupun non material
- Merugikan masyarakat secara keseluruhan
- Merugikan negara
- Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat

Pelaku kriminalitas

Pelaku kriminalitas Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok atau teroris. Untuk yang terakhir, teroris agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik atau paham.

Mengapa orang melakukan kejahatan, antara lain :

- Keterbatasan ekonomi
- Kurangnya kesadaran Ham/hukum
- Rasa Individualisme
- Pengaruh lingkungan
- Meningkatkan penganguran disuatu daerah

Penyebab orang melakukan kejahatan, antara lain :

- Kurang memahami pengertian hidup dan konsekuensi yang akan terjadi kedepannya.
- Berbuat jahat itu lebih mudah dan menyenangkan dari pada berbuat baik

Solusi mengatasi terjadinya kriminalitas

Salah satu solusinya adalah mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu dan derajat.

Penegakan Hukum

Menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Polri melalui fungsi reskrimnya merupakan garda terdepan dalam rangka penegakan hukum, menindak semua pelaku kejahatan yang ada dan memastikan pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Resiko

Resiko merupakan kata yang biasa kita dengar dan biasanya berkonotasi negatif, sesuatu yang tidak disukai atau sesuatu yang kita hindari. Resiko sering didefinisikan, seperti :

- Kerugian yang tidak diharapkan
- Penyimpangan dari yang diharapkan
- Kejadian yang tidak menguntungkan

Manajemen Resiko

Djojo Soedarsono (2003) memiliki pandangan manajemen resiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi didalamsebuah organisasi perusahaan maupun keluarga dan masyarakat.

Kasus tindak pidana harus dihadapi oleh anggota Polri khususnya fungsi reskrim setiap harinya seiring dengan berbagai tindak pidana yang terjadi dan kasusnyaapun semakin beragam. Untuk mau tidak mau anggota reskrim harus meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Alasan itu, Mabes Polri mengadakan pelatihan dan sertifikasi manajemen resiko bagi penyidik reskrim.

Tujuannya agar setiap anggota Polri khususnya fungsi reskrim memiliki kemampuan dari segi manajemen resiko untuk diaplikasikan pada saat pelaksanaan tugas.

BAB III

PEMBAHASAN

Jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak bisa diukur. Jika resiko tidak bisa diukur maka kita tidak bisa mengelola resiko. Anggota polri khususnya fungsi reskrim harus dapat mengidentifikasi resiko yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mengelola resiko tersebut. Langkah – langkahnya meliputi :

Pengelompokan Resiko

Dalam Pengelompokan resiko yang terdiri dari :

- 1. Resiko Murni**
- 2. Resiko Spekulatif**
- 3. Resiko Subyektif**
- 4. Resiko Objectif**
- 5. Resiko Statis**
- 6. Resiko Dinamis**

Dari Pengelompokan resiko tersebut ada beberapa resiko yang dapat terjadi bagi anggota reskrim, yaitu :

Resiko Murni

Adalah resiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya adalah kecelakaan. Resiko ini dapat terjadi pada saat terjadinya pengejaran terhadap para pelaku kejahatan yang melarikan diri menggunakan kendaraan mereka. Ketika Penjahat kabur maka dengan serta merta anggota reskrim pasti mengejar untuk menangkapnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya resiko karena menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi.

Resiko Dinamis

Muncul dari perubahan kondisi tertentu. Misal jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka rasio hukum yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya gugatan – gugatan baik pidana maupun perdata yang dilayangkan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian khususnya fungsi reskrim.

Jenis - jenis Resiko

Dalam Pengelompokan resiko yang terdiri dari :

- 1. Resiko Kematian**
- 2. Resiko Kecelakaan Kerja**
- 3. Resiko Kesehatan**

Dari jenis – jenis resiko tersebut ada beberapa resiko yang dapat terjadi bagi anggota reskrim, yaitu :

Resiko Kematian

Kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang pasti, tetapi timing dari kematian merupakan sesuatu yang tidak pasti. Pada saat melakukan penangkapan pelaku kejahatan, seringkali pelaku kejahatan melakukan perlawanan yang tentu saja mengancam keselamatan anggota reskrim yang bertugas melakukan penangkapan tersebut. Apalagi pelaku kejahatan yang memiliki senjata api, tingkat perlawanannya sangat tinggi sehingga ada beberapa anggota yang tewas tertembak.

Resiko Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada anggota reskrim adalah kecelakaan kendaraan baik menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun kendaraan roda 4 (mobil). Penjahat yang berusaha kabur dari kejaran anggota yang hendak menangkapnya akan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga memaksa anggota yang mengejarnya mengimbangnya agar dapat menangkap penjahat tersebut. Dari hal tersebutlah awal dari resiko kecelakaan kendaraan terjadi. Terbalik, menyenggol kendaraan lain atau orang dan tabrakan dapat saja terjadi pada saat tersebut.

Resiko Kesehatan

Kesehatan merupakan modal utama dalam bekerja. Kesehatan meliputi Jasmani dan Rohani. Anggota reskrim sangat berisiko mengalami gangguan kesehatan hal tersebut disebabkan antara lain :

- (1) Kurang tidur, dikarenakan pelaku kejahatan sering beraksi pada malam hari sampai saat subuh menyebabkan anggota reskrim jam kerjanya bergeser kebanyakan dimalam hari dan sering begadang.
- (2) Kurang istirahat, anggota reskrim bekerja full 1 x 24 jam non stop, setiap saat dibutuhkan terutama saat terjadi tindak kriminal harus siap bekerja walaupun sedang jatah lepas dinas. Hal ini menyebabkan kurangnya waktu istirahat. Apalagi didaerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi, anggota reskrim waktu istirahatnya sangat kurang.
- (3) Pola makan tidak teratur, anggota reskrim jam makannya tidak dapat ditentukan sesuai standar kesehatan. Seringkali karena kesibukan bekerja menyebabkan lupa untuk makan atau terlambat makan. Makanan yang dimakanpun cenderung makanan instan dan kurang memperhatikan kandungan gizinya.
- (4) Kurang berolahraga, anggota reskrim seringkali tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas olahraga secara teratur. Olahraga dilakukan pada saat tertentu saja dan intensitasnya sedikit belum tentu seminggu sekali dilakukan.

Faktor – Faktor Penyebab Resiko

Faktor – faktor yang menyebabkan resiko, antara lain :

1. Perubahan

Erat kaitannya dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat saat melakukan penangkapan. Situasi dan kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif maka resiko yang dihadapi anggota relatif rendah dan sebaliknya kondisi lingkungan masyarakat yang tidak aman dan banyak pelaku kejahatan maka resiko yang dihadapi anggota relatif tinggi.

2. Kesalahan strategi

Kesalahan strategi dapat menyebabkan resiko yang sangat tinggi pada anggota saat melakukan penangkapan. Anggota cedera dan pelaku kejahatan kabur adalah dampak dari kesalahan strategi.

3. Keputusan yang tidak tepat

Keputusan yang tidak tepat menyebabkan kesalahan dalam bertindak.

4. Persiapan yang kurang matang

Menyebabkan kegagalan saat melaksanakan tugas.

5. Kelengkapan pribadi

Kelengkapan pribadi merupakan jaminan keselamatan pada saat melakukan penangkapan. Kelengkapan seadanya sangat membahayakan bagi anggota apabila pelaku kejahatan melakukan perlawanan.

Identifikasi Resiko

Anggota Reskrim harus dapat mengidentifikasi resiko untuk mengenal secara pasti ancaman ketidak pastian yang dihadapi saat bertugas. Beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi resiko antara lain :

(1) Pengamatan

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan tempat keberadaan pelaku kejahatan. Untuk mengukur tingkat keamanan dan keselamatan baik anggota yang bertugas ataupun penduduk setempat pada saat melakukan penangkapan.

(2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi detil terkait pelaku kejahatan yang akan ditangkap. Untukantisipasi tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku saat dilakukan penangkapan.

(3) Pembututan

Pembututan dilakukan dengan mengikuti gerak – gerak pelaku kejahatan. Untuk mengetahui kebiasaan – kebiasaan pelaku kejahatan dan interaksi pelaku kejahatan. Untuk mengetahui pergerakan pelaku kejahatan agar tidak dapat lolos atau melarikan diri.

Evaluasi Resiko

Dalam tahap ini anggota Reskrim harus dapat mengetahui resiko murni berdasarkan frekuensi atau berdasarkan seringnya resiko terjadi. Selain itu perlu juga dianalisis besarnya atau dampak resiko. Harus dipertimbangkan dampak maksimum yang mungkin terjadi. Didalam mengevaluasi resiko secara menyeluruh perlu dikaji derajat resiko dengan cara akurat.

Hal ini diperlukan untuk menentukan :

- (1) Strategi atau Cara Bertindak
- (2) Banyaknya Kekuatan Personil
- (3) Peralatan yang harus digunakan
- (4) Unsur backup/bantuan yang diperlukan

Pengolahan Resiko

Dalam Pengolahan resiko yang terdiri dari :

- 1. Penghindaran**
- 2. Ditahan (Retention)**
- 3. Diversifikasi**
- 4. Transfer Resiko**
- 5. Pengendalian Resiko**
- 6. Pendanaan Resiko**

Dari pengolahan resiko tersebut ada beberapa resiko yang dapat dilakukan oleh anggota reskrim, yaitu :

Penghindaran

Merupakan tindakan preventif yang artinya tidak melakukan hal yang menyebabkan sebuah resiko terjadi. Hal-hal yang bisa dilakukan dari masing-masing jenis resiko :

a. Dari Jenis Resiko Kematian

Pada saat melakukan penangkapan bukan melakukan penghindaran dengan tidak melakukan penangkapan tetapi tetap melakukan penangkapan dengan memperhatikan standar operating procedure (SOP) penangkapan yang ada, antara lain kelengkapan alat, kekuatan jumlah anggota dan standar safety.

b. Dari Jenis Resiko Kecelakaan Kerja

Pada saat melakukan pengejaran pelaku kejahatan tetap memperhatikan standar operating procedure (SOP) pengejaran menghindari mengikuti cara pelaku. Salahsatunya batas kecepatan dan rambu-rambu lalulintas tetap diperhatikan sambil berkordinasi dengan petugas lalu-lintas untuk blokir jalan.

c. Dari Jenis Resiko Kesehatan

Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala dan mengkonsumsi multivitamin atau suplemen tambahan merupakan upaya yang dapat dilakukan.

Ditahan (Retention)

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika menghadapi sendiri resiko tersebut. Disini anggota sebaiknya menerapkan kehati-hatian pada saat bekerja.

Transfer Resiko

Jika kita tidak ingin menanggung resiko tertentu, kita bisa mentransfer resiko tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu menghadapi resiko tersebut. Disini bukan berarti anggota mentransfer resiko tersebut ke rekan kerjanya tetapi kepada persiapan apabila resiko tersebut terjadi. Secara kedinasan hal tersebut telah dilakukan untuk proteksi anggota dengan mengasuransikan seluruh anggota dari sejak bertugas sampai dengan pensiun termasuk jaminan-jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun akan lebih baik jika masing – masing anggota juga melakukan secara pribadi dengan memiliki Asuransi-asuransi terhadap aset, kesehatan dan jiwanya.

BAB IV

KESIMPULAN

Semua bidang pekerjaan memiliki risikonya masing-masing yang berbeda-beda pula. Tingkat resiko yang bisa terjadi mulai dari yang rendah sampai ke yang sangat tinggi. Dampak resiko yang terjadi dapat saja berupa materi maupun non materi. Apabila dampak yang terjadi adalah materi maka seseorang akan mengalami resiko kerugian yang menyangkut aset harta bendanya. Apabila dampak yang muncul adalah non materi maka seseorang akan mengalami resiko kesehatan atau meninggal.

Resiko juga dapat menimpah semua orang. Ketika resiko itu datang, siap atau tidak siap seseorang yang mengalami resiko harus menanggung resiko tersebut karena memang resiko tidak dapat dihilangkan meinkan hanya dapat diminimalisir agar tidak berdampak terlalu besar apabila terjadi.

Penting untuk itu setiap anggota polri khususnya anggota reskrim harus memahami manajemen resiko terhadap tugas pekerjaannya sehingga dapat mengetahui jenis-jenis resiko, mengidentifikasi resiko, mengetahui faktor-faktornya, menganalisis risikonya dan dapat mengolahnya. Hal ini dapat menghindarkan dan meminimalisir anggota reskrim mengalami resiko kesehatan, keselamatan kerja dan kematian saat sedang melakukan pekerjaan menangkap pelaku kejahatan dalam rangka penegakan hukum.

**MANAJEMEN RESIKO
DI SMA NEGERI 04 PALEMBANG**



**TUGAS PAPER MATA KULIAH
MANAJEMEN RESIKO**

**Oleh :
YULIATI
192510033
KELAS MM.34A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN –S2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA
2020**

1. Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan pasti kalian sudah mengenal yang namanya manajemen pendidikan bukan. Oleh karena, itu kita akan membahas tentang berbagai manajemen pendidikan yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan mutu sekolah tersebut, tetapi dalam pembahasan ini kita akan membahas manajemen resiko di sekolah.

Risiko merupakan kata yang sering didengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang ingin dihindari. Dengan begitu risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Sehingga semua itu menuntut untuk melakukan antisipasi dari awal dalam menghadapi risiko agar risiko yang dihadapi tidak menimbulkan sebuah kerugian. Risiko yang ada merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Dengan demikian, perlu adanya pengelolaan risiko yang menjadi hal penting bagi suatu organisasi, termasuk organisasi sekolah karena kegiatan pendidikan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan sebagaimana halnya dengan organisasi lainnya pasti akan selalu berhadapan dengan risiko, baik itu risiko yang berasal dari dalam maupun dari luar instansi pendidikan. Banyaknya permasalahan yang membelenggu dunia pendidikan mulai dari pengelolaan asset dan keuangan oleh instansi pendidikan hingga rendahnya mutu lulusan yang dihasilkan dari setiap jenjang sekolah kesemuanya membawa efek negatif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu risiko, dalam lembaga pendidikan yang dihadapi bisa berupa kenaikan SPP di sekolah. Hal tersebut, dapat sangat mempengaruhi keputusan siswa dalam memilih sekolah/madrasah. Jika SPP dinaikan, sekolah/madrasah berharap akan dapat membiayai lebih banyak program unggulan, namun demikian jika

tidak diantisipasi dan tidak membandingkan dengan lingkungan kompetitif, maka akan dapat menurunkan perolehan siswa, yang tentu pada akhirnya akan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sekolah/madrasah tersebut. Namun demikian, jika SPP diturunkan juga akan memunculkan risiko, baik itu risiko keuangan dengan menurunnya sekolah/madrasah dalam pengadaan asset, maupun risiko reputasi, yaitu menurunnya reputasi sekolah/madrasah tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan manajemen risiko. Pada dasarnya manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau konsekuensi risiko tertentu.

Pada penelitian ini manajemen risiko dikaitkan dengan pelaksanaa program pendidikan di sekolah. Adapun risiko-risiko yang akan dibahas dibatasi pada pelaksanaan program berdasarkan pendekatan delapan Standar Nasional Pendidikan yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, maka diperlukan adanya perancangan dan pengembangan terhadap program pendidikan yang dijalankan sekolah. Setiap sekolah dituntut untuk berusaha mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan dapat menjawab segala tantangan zaman. Hal ini, dimaksudkan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Tujuan yang akan dicapai oleh setiap lembaga pendidikan harus memiliki visi, misi, motto, dan program-program unggulan yang telah direncanakan dan disepakati. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan cara dalam pencapaiannya yang sering dikenal dengan istilah rencana stretegi.

Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas.

II. Gambaran UMUM

Manajemen Resiko

Manajemen Resiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi/lembaga, perusahaan, keluarga dan masyarakat. Manajemen Resiko mencakup kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi program penanggulangan resiko. Manajemen Resiko juga bisa disebut sebagai suatu metode logis, sistematis yang merupakan identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelapor resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Menurut Irham Fahmi, Manajemen Risiko adalah “suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.”

Adapun jenis-jenis risiko dikemukakan oleh Pramana berikut ini uraiannya:

1. Risiko berdasarkan sifat dibagi kedalam dua jenis, yaitu:
 - a. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*), ini adalah risiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan.;
 - b. Risiko Murni (*Pure Risk*). Ini adalah yang tidak di sengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba.
2. Risiko berdasarkan kemungkinannya untuk dialihkan
 - a. Risiko yang dapat dialihkan, ini adalah risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai obyek yang terkena risiko kepada perusahaan;

- b. Risiko yang tidak dapat dialihkan, ini adalah semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif (keuntungan) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada perusahaan.

3. Risiko berdasarkan kemunculannya

- a. Risiko internal yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, dan lain sebagainya;
- b. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan, perubahan kebijakan dan lain sebagainya.

Berdasarkan jenis risiko di atas, bahwa jenis pelaksanaan program pendidikan berdasarkan sifat dari risiko tersebut cenderung untuk mengambil risiko spekulatif. Risiko spekulatif, memungkinkan lembaga untuk berkeaktivitas, berinovasi, dan juga ada keuntungan darinya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu yang menyatakan bahwa risiko spekulatif dikenal sebagai risiko dinamis, yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sedangkan risiko berdasarkan kemunculannya, pada pelaksanaan program pendidikan terdapat dua jenis risiko yaitu risiko internal dan eksternal. Jenis risiko tersebut juga sejalan dengan pendapat Sopuntan, yang mengatakan bahwa menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam:

1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti: kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, miss manajemen dan sebagainya
2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan policy pemerintah dan sebagainya.

Pendapat yang disampaikan oleh Sopuntan tersebut faktor internal menekankan kepada perbuatan manusia, manajemen yang kurang baik, keuangan dan lain sebagainya. Sedangkan risiko eksternal menekankan kepada kerugian yang berasal dari luar organisasi. Oleh sebab itu perlu dilakukan

tata kelola terhadap risiko yang terjadi pada lembaga pendidikan agar pengembangan program pendidikan dapat berjalan dengan baik. Jika program pendidikan berjalan dengan baik maka mutu pendidikan akan tercapai.

Dimana saat ini, mutu merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup lembaga pendidikan. Orientasi masyarakat mode telah berubah, dari yang dulunya fokus pada aspek kuantitas, menjadi fokus pada aspek kualitas. Perlu diketahui bahwa untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan yang berkualitas dibutuhkan suatu paradigma yang komprehensif terhadap pengelolaan lembaga pendidikan. Paradigma yang komprehensif dimaksudkan adalah suatu pandangan yang menyeluruh atas berbagai komponen dalam lembaga pendidikan. Paradigma pengelolaan lembaga pendidikan yang berkualitas adalah terkait dengan organisasi yang sehat. Untuk itu mutu pendidikan berkaitan dengan proses pendidikan.

Pada dasarnya upaya peningkatan mutu dalam bidang pendidikan difokuskan kepada mutu proses pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini mencakup sejumlah unsur utama yang mendasar yang membentuk mutu pembelajaran. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan pembelajaran, isi kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dana, manajemen dan evaluasi. Tujuan penting yang diperlukan dalam peningkatan mutu adalah ketepatan dan kejelasannya. Sekolah yang memiliki proses yang sehat terbentuk apabila terdapat akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut tidak hanya dipahami pada aspek keuangan, namun juga dibutuhkan penjelasan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Selain daripada akuntabilitas, dibutuhkan otonomi atas unit-unit dalam struktur organisasi lembaga pendidikan, sulit dibayangkan apabila lembaga pendidikan berharap menjadi sekolah yang berkualitas, sehat, dan akuntabel, jika tidak diberikan otonomi pada unit-unit yang berada di dalamnya. Setiap pelaksanaan tersebut pasti akan mengalami risiko baik risiko tersebut memiliki dampak yang besar maupun risiko berdampak kecil dan masih dapat ditangani. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam dunia pendidikan perlu dilkakukan agar dapat mengantisipasi, mengelola serta mengantisipasi risiko yang terjadi.

Dengan begitu manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu yang penting dalam kehidupan. Risiko mungkin hadir dalam berbagai situasi yang mana keputusan harus dibuat walaupun dengan informasi yang tidak lengkap. Istilah risiko mungkin tidak akan muncul apabila aktifitas-aktifitas yang dilakukan berjalan baik. Manajemen risiko tersebut ditujukan untuk memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

Pada lembaga pendidikan manajemen risiko memiliki peran yang penting dimana sekolah tidak terlepas dari adanya risiko. Kenyataan di lapangan manajemen risiko telah dilaksanakan pada lembaga pendidikan. Namun, proses dan prosedurnya agak berbeda dibandingkan dengan perusahaan dibidang keuangan dan bisnis. Pelaksanaan Manajemen risiko di SMA Negeri 04 Palembang Jadilakukan dengan prosedur sesuai sertifikat yang dimiliki oleh dua sekolah tersebut yang memastikan kepada mutu sekolah. Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko pengukuran risiko, pengendalian risiko dan evaluasi risiko.

Proses-proses tersebut seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. .manajem risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas (keterbukaan), kinerja pengukuran dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Focus Group Discussion (FGD), observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data data yang telah terkumpul terlebih dahulu diperiksa keabsahannya dengan teknik cross check. Adapun teknik analisis datanya adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi.

b. Konsep Manajemen Risiko

Berdasarkan beberapa wawancara, maka dapat ditarik benang merah bahwa konsep manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan lembaga pendidikan saat ini yang semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas lembaga pendidikan yang dapat meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi lembaga pendidikan. Sasaran utama dari implementasi risiko adalah melindungi lembaga pendidikan terhadap kerugian yang mungkin timbul pada proses pelaksanaan program pendidikan. Dalam pengelolaannya dilakukan penyeimbangan antara strategi pengelolaan manajemen dan pelaksanaan pendidikan dengan pengelolaan risikonya sehingga lembaga pendidikan akan mendapat hasil optimal dari operasionalnya.

c. Risiko yang teridentifikasi di SMA Negeri 04 Palembang

Pelaksanaan identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis dan memantau faktor-faktor internal dan eksternal. Penelitian bahwa penetapan risiko membentuk terjadinya proses alternatif risiko guna menangani resiko tersebut agar dapat diminimalisi. Selanjutnya SMA Negeri 04 Palembang pembangunan juga melakukan pemetaan pada kerugian dari aspek-aspek risiko yang timbul pada saat mengidentifikasi resiko. Risiko internal yang teridentifikasi adalah terkait dengan pemenuhan standra nasional pendidikan dimana risikonya lebih

menitik beratkan kepada teknis terlaksananya program pendidikan seperti siswa yang tidak naik kelas, kebakaran, listrik mati, dan lain sebagainya.

d. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi lembaga pendidikan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko dilakukan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Pada pelaksanaan program pendidikan baik di SMA Negeri 04 Palembang ketika melakukan pengukuran risiko pasti akan melihat dampak dari terjadinya risiko, baik risiko tersebut akibat kelalaian manusia maupun risiko tersebut akibat bencana alam atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya risiko. Sebelum melakukan pengukuran risiko maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi risiko.

e. Strategi Pengendalian Risiko

Strategi pengendalian risiko di SMA Negeri 04 Palembang dilakukan pada pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan, yang pasti akan mengalami hambatan yang menimbulkan risiko, pengendalian risiko di sini meliputi upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko negatif, atau memindahkan risiko yang akan muncul. Proses pengendalian risiko di SMA Negeri 04 Palembang merupakan proses yang berulang, mulai dari melakukan *assessment* terhadap sebuah perlakuan risiko sampai memperkirakan apakah tingkat risiko dapat diterima atau tidak oleh madrasah, bila belum diterima oleh ke dua sekolah tersebut maka harus dicari alternatif penanggulangan risiko lainnya.

Kemudian dilakukan proses pengendalian dengan memilih alternatif mana yang tepat untuk risiko yang sedang dihadapi, hingga perkiraan hasil dari perlakuan tersebut menghasilkan tingkat risiko yang tersisa dan risiko tersebut

dapat diterima oleh SMA Negeri 04 Palembang. Proses strategi pengendalian risikonya dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan program-program yang dilaksanakan. Dari program-program tersebut dapat dimaksudkan agar dapat menghindari risiko (*risk avoidnace*), mengurangi risiko (*risk management*), memindahkan risiko (*risk transfer*), penahanan risiko (*risk retention*).

f. Evaluasi Risiko

Kriteria Evaluasi yang dilakukan seperti mengadakan rapat untuk memantau terlaksananya program pendidikan dan risiko-risiko yang terjadi, adapun evaluasi yang dilakukannya adalah sebagai berikut, rapat satuan pendidikan, rapat pimpinan (Rapim), rapat tinjauan manajemen, Audit Mutu Internal, Audit Mutu Eksternal, dan Evaluasi kepuasan pelanggan.

g. Pengembangan Guru dan Staf

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam mengelola dan memberdaya seluruh warga sekolah, termasuk pengembangan guru dan staf. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku warga sekolah melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. Tujuannya untuk mendayagunakan guru dan staf secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Untuk mendapatkan guru atau staf yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon guru dan staf yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Khusus untuk guru, program pengembangan kapasitas tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang sanantiasa harus terpenuhi agar guru sebagai pilar utama pendidikan memiliki sekurang-kurangnya empat kompetensi: kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Untuk hasil wawancara dari salah satu guru di SMA Negeri 04 Palembang bahwa di sekolah tersebut ada juga beberapa guru, staf atau karyawan yang juga melalaikan tugasnya, itu pun akan berdampak pada pihak sekolah seperti proses

pengajaran yang terhambat yang menyebabkan dimana waktunya ada aktivitas mengajar tapi karena ada guru yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwalnya maka aktivitas pengajaran yang lain juga terhambat (tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan). Dalam hal ini di sekolah tersebut ada peringatan terhadap guru, staf atau karyawan yang tidak kompeten tersebut seperti teguran secara lisan, jika secara lisan tidak ada pengaruh dari guru yang bersangkutan maka akan di peringatkan lagi dengan cara SP1-SP2 jika sampai SP2 tidak dihiraukan oleh guru yang bersangkutan maka dari pihak sekolah mengeluarkan peringatan sistem ke 3 yaitu pemberhentian karena melalikan tugas sebagi guru yang kompeten.

Untuk daya tampung di SMA Negeri 04 Palembang sendiri menyesuaikan kapasitas yang diperlukan dari pihak sekolah itu. Jadi tidak ada kelebihan kapasitas pengajar, staf maupun karyawan karena pihak sekolah akan mengevaluasi berapa pendidik yang akan mengajar melalui jam pelajaran dibagi dengan daya tampung kelas. Kalau untuk staf atau karyawan akan menyesuaikan dengan cara bagian-bagian yang kosong atau kurang sesuai dengan kebutuhan jika misalnya dalam sekolah itu kekurangan staf TU atau penjaga sekolah.

Di SMA Negeri 04 Palembang juga ada pelatihan bagi guru, staf maupun karyawan. Untuk waktu pelatihanya juga menyesuaikan dengan jadwal mengajar. Misalnya jika ada beberapa guru yang tidak banyak mengajar maka bisa di recrument sebagai perwakilan dari sekolah tersebut untuk mengikuti pelatihan. Jika semua mengajar pada hari tersebut tidak bisa mengikuti pelatihan. Maka bisa diganti dengan hari lain seperti di hari dimana semua siswa melaksanakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester untuk staf pendidik maupun karyawan melaksanakan pelatihan jika dihari yang lain tidak bisa karena di hari yang efektif tersebut yang memungkinkan bisa mengikuti pelatihan karena tidak ada jam mengajar dan banyak waktu luangnya.

h. Pengembangan Peserta Didik

Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari penentuan daya tampung sekolah atau jumlah siswa baru yang akan

diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas atau mengulang.

Menurut Moedjiarto, menemukan bahwa keterlibatan peserta didik dalam kehidupan sekolah mempunyai korelasi dengan prestasi akademik peserta didik. pembelajaran hanya mungkin terjadi bilamana peserta didik mempunyai pandangan yang positif terhadap sekolahnya dan perannya mereka didalamnya. Keterlibatannya peserta didik dalam kegiatan sekolah atau dengan memberikan tanggungjawab kepada mereka, berarti guru berusaha menumbuhkan pada diri peserta didik rasa memiliki terhadap sekolah dan terhadap pembelajarannya sendiri. Bentuk keterlibatan peserta didik bisa bermacam-macam, tetapi secara umum hanya bisa dilakukan sesuai penyusunan program kegiatan kurikulum sekolah dan dalam penyusunan kebijakan sekolah Daya tampung per kelasnya 16 kelas dengan jumlah siswa yang ada dalam satu ruangan berjumlah 32. Jadi untuk keseluruhan kelasnya berjumlah 48. Jadi bisa diperkirakan jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 04 Palembang ada 1536 siswa. Di sekolah tersebut juga ada beberapa sistem untuk peserta didiknya yang tidak naik kelas atau tinggal kelas seperti contohnya jika ada anak didik dari kelas 1 yang tidak naik kelas maka akan dikeluarkan secara baik atau juga bisa mendaftar ulang lagi. Sedangkan untuk kelas 2 jika tidak naik kelas maka bisa mengulang kembali dari kelas 1.

Risiko intern untuk peserta didik juga ada seperti fasilitas ruangan kursi meja atau tembok sekolah yang selalu di gunakan peserta didik mencurahkan perasaan contohnya coretan-coretan yang akan berdampak pada pihak sekolah juga. Walaupun sudah ada peringatantapi masih ada peserta didik yang masih melakukan kebiasaan tersebut mencoret kursi, meja atau tempok. Tapi kebanyakan dari mereka mencoret di meja, itu pun kalau saat perasaan si anak lagi tidak enak atau bahagia. Dari pihak sekolah sendiri hanya bisa mengecet ulang kursi atau meja yang terkena coretan tersebut, tidak setiap hari mengecet kursi dan meja kalau setiap hari pihak sekolah juga akan rugi nantinya. Jadi hanya saat tertentu saja akan dicet ulang meja dan kursi yang sudah koror terkena tinta, tipec taupun goresan benda tajam yang lainnya.

i. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran

Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran merupakan bagian dari manajemen sekolah. Yang mencakup beberapa kegiatan antaranya perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas, pencatatan kemajuan belajar peserta didik, serta peningkatan perbaikan pembelajaran serta pengisian waktu jam kosong.

Perkembangan kurikulum menimbulkan perubahan struktur ataupun fungsi kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut perlunya ada penyesuaian yang terus menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti guru harus bersikap kreatif dalam mengembangkan proses pembelajarannya seefisien mungkin, agar proses pembelajaran bisa terlaksana. Menurut Ngalm Purwanto ada beberapa langkah-langkah model pengambilan keputusan, yaitu antara lain:

- a. Mendefinisikan dan menetapkan masalah. Kepala harus mengetahui permasalahannya, terutama latar belakang masalah dan bentuk masalahnya yang kongkret. Jika realitas dari masalahnya telah diketahui, kepala sekolah dapat menetapkannya sebagai masalah, bukan sekedar wacana atau praduga dan khayalan. Yang dimaksud masalah adalah pertentangan antara kenyataan yang dihadapi dan rencana yang telah ditetapkan atau realitas tidak sejalan dengan teori.
- b. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Menentukan pedoman pemecahan masalah sehingga dalam dalam melaksanakan pemecahan masalah yang dilakukan oleh semua anggotanya berjalan seirama dan sinergi.

- c. Mengidentifikasi alternatif dalam memutuskan suatu permasalahan dengan kata lain jika yang satu tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana maka kita mempunyai alternatif yang lain.
- d. Setelah itu kita menilai alternatif mana yang bisa berhasil untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kepala sekolah atau lembaga sekolah yang bersangkutan.

Untuk kurikulum yang pernah dipakai di sekolah SMA Negeri 04 Palembang tersebut adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum 2013. Untuk persiapan pendidik dalam melaksanakan tugas mereka seperti halnya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak sekolah, daerah pusat maupun pemerintah.

Resiko yang dihadapi pihak sekolah jika ada kurikulum baru seperti halnya pemberitahuan kepada pendidik. tapi dalam hal kurikulum ini tidak sembarangan pemerintah mengeluarkan kurikulum. Dalam hal ini pasti ada pemberitahuan dari pihak sekolah jika ada kurikulum baru seperti mengundang pihak sekolah akan kurikulum baru tersebut, jika sudah disampaikan kepada pihak kepala sekolah yang bersangkutan maka langsung diberitahukan kepada bawahannya yaitu pendidik dan karyawan yang bersangkutan akan kurikulum tersebut agar bisa menyesuaikan kurikulum yang baru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum tidak langsung bisa diganti harus ada langkah atau prosedur yang harus dipersiapkan pihak sekolah, dan tidak semua sekolah bisa menerapkan kurikulum baru hanya untuk beberapa sekolah saja memenuhi syarat jika ada kurikulum baru atau di ganti tetapi tidak dengan paksaan secara serentak menggantinya butuh penyesuaian dari pihak yang bersangkutan.

Dalam kurikulum ini tentunya kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sangatlah berpengaruh terjadinya proses pembelajaran. Jika seandainya di sekolah tersebut kompetensi tersebut tidak sesuai dengan keinginan maka akan berakibat tidak meningkatnya atau perkembangan kemampuan peserta didik yang tentunya akan merugikan pihak sekolah juga. Tapi di SMA Negeri 04 Palembang tersebut

kompetensinya sudah diterapkan dengan baik dengan hasil yang memuaskan seperti prestasi yang diperoleh dari berbagai cabang dari tingkat nasional, provinsi, daerah, dan sampai juga internasional. Tetapi jika sebaliknya kompetensi tidak terpenuhi maka pihak sekolah akan mengandakan pengembangan pelatihan dari dinas yang terkait dengan kompetensi guru yang memang belum bisa mengembangkan empat kompetensi tersebut. Manajemen strategi pada dasarnya membuat atau merencanakan sesuatu yang dikerjakan, atau menulis sesuatu yang dikerjakannya. Jadi manajemen dan perencanaan baru akan dikerjakan secara cermat, dan belum dilaksanakan. Seperti halnya seseorang berkata, bahwa lembaga pendidikan sudah menggunakan manajemen atau telah menerapkan ISO (International Certificate Organization), namun ternyata kenyataannya tidak lebih dari lembaga penerapan ISO. Seperti ibaratnya kamar mandi yang kotor, karyawannya yang tidak disiplin, dan pelayanannya yang tidak memuaskan hatai dan sebagainya. Ternyata mereka baru saja menulisnya tapi belum menerapkannya atau mengerjakannya. Sama halnya seorang guru atau dosen yang sudah disertifikasi, menganggap bahwa ia sudah baik, kemudian tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitas diri, meneliti, menulis buku, dan lain sebagainya. Pada hal sesungguhnya mereka baru memenuhi persyaratan atau merencanakan untuk menjadi yang terbaik, namun pada hakikatnya mereka belum melakukannya. Dengan demikian manajemen harus diimbangi dengan komitmen untuk melaksanakan perencanaan yang telah dibuat itu. Peluang dan Ancaman Eksternal mengacu pada ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, serta tren kompetisi dan kejadian yang secara signifikan dapat menguntungkan atau membahayakan organisasi dimasa depan. Peluang dan ancaman sebagian besar berada di luar kendali organisasi, sehingga disebut eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi yang dapat di kontrol yang dijalankan dengan sangat baik atau sangat buruk.

Antisipasi dari pihak sekolah jika ada peserta didik yang mengikuti suatu aksi yang akan membahayakan pihak sekolah atau peserta didik atau juga pihak lain. Seperti halnya perkelahian antar sekolah tentunya dari pihak sekolah sendiri

tidak akan mengeluarkan peserta didik jika tidak ada bukti yang kuat jika peserta didik tersebut melakukan pelanggaran yang diluar etika. Hal-hal yang dilakukan pihak SMA Negeri 04 Palembang dalam menanggapi etika yang tidak baik seperti perkelahian antar sekolah yaitu:

- a. Komunikasi dengan siswa yang bersangkutan apakah siswa tersebut adalah pelakor, narasumber, atau hanya pihak ketiga yang dirugikan dari pihak lain;
- b. Melihat siswa dengan keterlibatan korban yang bersangkutan.

Tetapi jika siswa tersebut memang dalang dari suatu permasalahan maka dari pihak sekolah akan menindaklanjuti dengan memberikan nasihat oleh wali kelasnya jika tidak didengar juga akan dipanggil siswa tersebut keruang BK untuk konsultasi lebih lanjut, jika tidak bisa dengan guru BK maka akan di panggil wali orang tuanya. Dalam hal ini siswa akan diberi surat peringatan untuk juga menulis surat pernyataan bahwa siswa tersebut tidak akan melakukannya lagi atau juga pernyataan menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak di enak dipandang tersebut. Tapi jika sudah ada keterlibatan dengan polisi maka dari pihak sekolah hanya bisa memberikan guru pendamping saja.

j. Meningkatkan Mutu Sekolah

Suatu proses yang sistematis dan terus menerus meningkatkan kualitas proses dan faktor mengajar tujuannya agar tercapainya suatu proses hasil yang lebih efektif dan efisien. Seperti adanya visi dan misi tujuan sekolah SMA Negeri 04 Palembang. Visinya adalah” Terwujudnya tamatan yang islami, profesional, berbudaya industri, nasional dan berdaya saing global. Dengan misi memperkokoh aqidah dan budaya hidup islam, Mengembangkan kompetensi sesuai dengan bidangnya, Menyelaraskan kurikulum dengan dunia industri, Mengembangkan semangat nasionalisme, dan Meningkatkan daya saing tamatan. Dengan adanya visi dan misi SMA Negeri 04 Palembang ini bisa meningkatkan mutu sekolah tidak hanya dalam segi penambihan saja tapi bisa dilihat dari segi hasil proses dan output yang bisa kita lihat dari

pemambaran yang sebelumnya. Untuk meningkatkan mutu sekolah tidak hanya pada misi dan visi saja tapi dari berbagai aspek juga berpengaruh untuk meningkatkan mutu sekolah. Seperti realitas sekolah tersebut apakah kondisi fisik baik untuk aktivitas mengajar dari gedung dan fasilitas yang lainnya.

IV. Kesimpulan

Risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan penghindaran, minimalisasi, atau penghapusan risiko yang tidak dapat diterima. Dengan adanya manajemen risiko maka sekolah mampu mengantisipasi, mengelola segala risiko-risiko yang dapat terjadi, sedang terjadi dan bahkan dengan adanya manajemen risiko, risiko-risiko yang telah terjadi dapat menjadi acuan dasar perbaikan dan pengembangan sekolah agar risiko-risiko tersebut tidak terjadi kembali di kemudian hari. Adapun jenis risiko berdasarkan sifat risiko yang terdapat pada SMA Negeri 04 Palembang adalah risiko spekulatif dimana risiko ini menuntut lembaga pendidikan untuk berinovasi, berkreasi dalam mengelola organisasi.

Sedangkan jenis risiko berdasarkan kemunculannya terhadap pelaksanaan program pendidikan yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Dimana risiko internal tersebut dilihat kepada risiko-risiko yang terjadi terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi risiko operasional, risiko sumber daya manusia, risiko kerugian, risiko waktu. Sedangkan risiko eksternal terkait dengan risiko reputasi sekolah. Adapun sekolah yang lebih banyak mengandung risiko dilihat dari manajemennya adalah SMA Negeri 04 Palembang dikarenakan banyaknya jumlah rombongan belajar dan siswanya jumlah karyawan dalam departemen kasubag umum khususnya karyawan kebersihan dan maintenance serta security mengingat jumlah siswa dan gedung yang besar. Sedangkan risiko di SMA Negeri 04 Palembang cenderung lebih banyak dengan melihat banyaknya tenaga kependidikan serta jumlah siswa dan rombongan belajarnya banyak. Pelaksanaan manajemen risiko di SMA Negeri 04 Palembang berjalan cukup baik dan telah dilaksanakan proses tersebut. Namun, istilahnya saja yang berbeda dalam dunia pendidikan. Adapun

proses manajemen risikonya terdiri dari identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko dan dilakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Maralis, Reni dan Aris Triyono, *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Mulyasa, E. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Pramana, Tony. *Manajemen Risiko Bisnis*. Jakarta: Sinar Ilmu Publishing, 2011.
- Soputan, Gabby E.M. "Manajemen Risiko Keselamatan Kerja (K3) Studi Kasus Pada Pembangunan SMA Eben Haezar", dalam *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol. IV, No. 4, Desember 2014.
- <http://repository.unpas.ac.id/27631/4/BAB%20II%20Melan.pdf> 15.44 30 oktober 2019.
- .

